

MONITOR BERITA

II

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 1											TÁHUN 2004																			

Penasihat Pertamina Bergaji Rp 75 Juta

Menjadi sangat ironi, ketika Pertamina kesulitan keuangan, di sisi lain terjadi pemborosan.

JAKARTA — Belum usai kontroversi penjualan tanker dan tingginya gaji direksi Pertamina, perusahaan pertambangan minyak dan gas negara itu kembali diterpa persoalan uang. Kali ini, terkait dengan pengangkatan Menteri Keuangan, Boediono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, sebagai penasihat ahli komisaris Pertamina.

Gaji kedua penasihat ahli komisaris itu sama dengan gaji komisaris utama yang dipegang Menneq BUMN, Laksamana Sukardi, yakni Rp 75 juta per bulan. Besarnya gaji tersebut separo dari gaji direktur utama Pertamina yang mencapai Rp 150 juta.

Pengangkatan dan besarnya gaji keduanya berdasarkan salinan SK Komisaris Pertamina Nomor 005/KPTS/K/DK/2003 dan Nomor 006/KPTS/K/DK/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang ditandatangani Laksamana sebagai komisaris utama. Pada poin memutuskan bagian ketiga SK itu menyebutkan bahwa kepada penasihat ahli termaksud pada dikturn pertama, diberikan honorarium sebagaimana yang diberikan kepada komisaris utama.

Tugas Boediono, seperti disebutkan SK tersebut, memberi nasihat dan masukan mengenai ke-

uangan dalam kaitan dengan subsidi pemerintah untuk BBM dan pengembangan usaha. Sedangkan tugas Purnomo, memberi nasihat dan masukan mengenai perkembangan pasar dan harga minyak mentah dunia dan tugas-tugas penyediaan dan pengadaan BBM dalam negeri dalam hubungannya dengan subsidi pemerintah.

Padahal, kata Ketua Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI), Otto Geo Diwara P, struktur penasihat ahli untuk komisaris tidak ada ketentuannya dalam UU Nomor 22/2001 tentang Migas, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, dan AD/ART Pertamina. Lainnya, kata dia, tugas dan tanggung jawab penasihat tersebut mengada-ada, karena sudah ada staf ahli komisaris dari kaum profesional dan pensiunan pegawai Pertamina.

"Ini namanya kolusi terstruktur dan sangat menyakitkan," kata Otto ketika dihubungi *Republika*, Ahad (27/6) malam. Bagaimana tidak menyakitkan, tuturnya, pada saat kondisi keuangan Pertamina berdarah-darah — sementara aset-asetnya dijual — direksi, komisaris, dan penasihat Pertamina malah menikmati gaji yang sangat besar.

Sebelumnya, gaji direksi Pertamina juga naik mulai dari 28-50

persen. Gaji direktur utama yang tadinya hanya Rp 107,71 juta per bulan, kini menjadi Rp 150 juta. Sementara untuk direktur lainnya, yang tadinya Rp Rp 91,12 juta, kini Rp 140 juta, atau hanya terpaut Rp 10 juta dari direktur utama.

Otto menilai masuknya kedua menteri itu ke dalam penasihat komisaris tidak lepas dari rencana Laksamana dan direksi yang ingin menjual dua tanker Pertamina. "Lihat saja pernyataan Menkeu Boediono yang seolah-olah tak tahu dan lepas tanggung jawab dalam soal penjualan tanker," tegasnya.

Kepala Divisi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat Pertamina, Hanung Budya Yukyanta, menyatakan dirinya belum bisa menjawab perihal pengangkatan penasihat komisaris tersebut. Ia mengaku selama ini dirinya tidak terlalu memperhatikan struktur kepengurusan dewan komisaris. "Besok saja Anda hubungi saya lagi," tegas Hanung ketika dikonfirmasi via telepon seluler.

Anggota Komisi VIII DPR, Harry Sohar, mengatakan undang-undang (Migas) tidak mengatur dan menyebutkan adanya posisi penasihat ahli komisaris. Bila ditinjau dari segi fungsi, kata Sohar, posisi itu tidak ada. "Itu kebijakan yang bablas dan buang-buang uang saja," tandas anggota dewan dari Golkar itu.

Ia menegaskan, menjadi sangat ironis, pada saat Pertamina kesulitan keuangan, ternyata di dalamnya terjadi pemborosan, termasuk di jajaran komisaris. ■ erd/c01

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2004

Pertamina Menggaji Dua Menteri untuk Menjadi Penasihat Komisaris

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun telah mempunyai lima komisaris yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang, Pertamina tetap merasa perlu menggaji Menteri Keuangan Boediono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Besarnya gaji kedua menteri ini sebagai penasihat diputuskan sama dengan gaji yang diterima Komisaris Utama Pertamina.

Dalam salinan Keputusan Komisaris Pertamina yang beredar di kalangan wartawan, Minggu (27/6), disebutkan bahwa kedua menteri tersebut diberikan honorarium yang sama dengan yang diterima Komisaris Utama sebesar Rp 75 juta per bulan atau 50 persen gaji Direktur Utama Pertamina.

Bahkan, biaya pelaksanaan tugas penasihat ahli termasuk biaya perjalanan dinas dalam

maupun luar negeri dibebankan pada anggaran Komisaris Pertamina.

Dalam surat keputusan terpisah dengan tanggal penetapan 23 Oktober 2003, tertulis bahwa Boediono mendapat tugas memberi nasihat dan masukan kepada komisaris mengenai keuangan dalam kaitan dengan subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengembangan usaha. Sementara, tugas Purnomo adalah memberi nasihat dan masukan kepada komisaris Pertamina mengenai perkembangan pasar dan harga minyak mentah dunia dan tugas-tugas penyediaan dan pelayanan BBM di dalam negeri dalam kaitannya dengan subsidi pemerintah.

Saat ini Dewan Komisaris Pertamina terdiri dari Presiden Komisaris yang dijabat Menteri

BUMN Roes Aryawijaya, Dirjen Migas Departemen ESDM Iin Arifin Takhyan, Mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung, dan Mantan Dirjen Anggaran Depkeu Anshari Ritonga.

Akan tetapi, Boediono dan Purnomo bukan orang baru di jajaran komisaris Pertamina karena sebelumnya mereka duduk sebagai komisaris yang mewakili pemerintah. Pada waktu itu namanya Dewan Komisaris Pertamina untuk Pemerintah (DKPP), keberadaannya hingga Pertamina menjadi perusahaan perseroan pada 17 September 2003.

Sementara itu, dalam sebuah pertemuan dengan Kompas akhir pekan lalu, seorang direktur Pertamina menyatakan sudah berkomunikasi dengan Menkeu Boediono menyangkut masalah finansial dalam peng-

adaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Sementara, Kepala Divisi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat PT Pertamina Hanung Budya mengaku belum dapat memberikan keterangan secara rinci mengenai penasihat ahli komisaris Pertamina. Akan tetapi, dia memastikan hal itu merupakan hak prerogatif dari komisaris untuk mengangkat penasihat.

Tidak lazim

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, adanya penasihat ahli komisaris Pertamina (Persero) merupakan hal yang tidak lazim dan perlu dipertanyakan urgensinya.

Akan tetapi, mungkin Pertamina menganggap dengan aset triliunan dan perusahaan akan menjadi tanggungan pemerintah jika kolaps, maka

menjadi hal yang lazim jika kedua menteri itu dijadikan penasihat. Pasalnya, jika Pertamina kolaps akan ditangani kedua menteri itu juga.

Menurut Faisal, pengangkatan itu tetap saja ada kejanggalan dalam penetapan Menkeu Boediono dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sebagai penasihat ahli komisaris Pertamina.

"Dulunya Pak Boediono, Pak Purnomo, dan Pak Kwik adalah komisaris Pertamina. Kemudian mereka diganti. Lalu kok kemudian bisa dipilih kembali penasihat ahli bagi komisaris dengan gaji yang sama dengan komisaris utama pula. Ini kan jadi aneh, kenapa hanya dua orang dan bukan tiga orang yang dulunya adalah komisaris Pertamina diangkat kembali menjadi penasihat," ujarnya.

Menyinggung tugas Menkeu dan Menteri ESDM sebagai penasihat ahli komisaris, Faisal mengatakan, tugas tersebut sebenarnya sudah melekat dalam tugas dan fungsi mereka sebagai menteri.

Menurutnya, penasihat ahli ini harusnya dapat memberikan pandangan terhadap perkembangan Pertamina sebagai *corporate*. "Atau bagaimana melakukan investasi yang strategis. Tetapi tugas yang ada dalam surat pengangkatan itu memang sudah merupakan tugas menkeu dan menteri ESDM. Jadi buat apa penasihat ahli seperti itu. Seberapa besar peran mereka berdua? Saya rasa sebenarnya sangat minimal. Kalau menurut saya, jabatan sebagai penasihat ahli itu seharusnya diisi oleh orang yang memang benar-benar mengerti mengenai perminyakan," ujar Faisal. (TAV/BOY)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

Direksi Pertamina Siap Buka Dokumen Penjualan Tanker

JAKARTA (Media): Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi, menegaskan komisaris dan direksi PT Pertamina (pesero) siap membuka dokumen penjualan dua tanker raksasa (*very large crude carrier/VLCC*).

"Kami siap mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) atau Government Watch (Gowa) agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kami akan membeberkan dokumen secara transparan dan tidak saling curiga untuk menghindari asumsi yang tidak benar," kata Laksamana Sukardi yang juga Komisaris Utama Pertamina kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Menurutnya, sejauh ini Pertamina sudah bersikap transparan dengan menjelaskan isi dari dokumen penjualan tanker tersebut. Tetapi, yang muncul ke permukaan justru kecurigaan yang pada dasarnya sangat lemah.

Laksamana menegaskan bahwa penjualan dua tanker tersebut tidak lain sebagai upaya untuk menyelamatkan perseroan. Pasalnya, BUMN minyak dan gas (migas) tersebut kini sedang mengalami kesulitan keuangan baik dengan pemerintah maupun kreditor sebesar Rp17,7 triliun.

Sehingga arus keuangan (*cash flow*) Pertamina dalam kondisi kritis, padahal setiap bulan per-

usahaan harus menalangi pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp3 triliun, ditambah lagi beban harga minyak yang tinggi saat ini.

"Apalagi *cash flow* waktu Desember 2003, kami membayar utang kepada pemerintah cukup besar sehingga juga *nomboki* subsidi BBM. Jadi, situasi dan kondisi perusahaan itu perlu penyesaran," ungkap Laksamana.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi VIII DPR Cecep Rukmana mengatakan sampai kini pihaknya belum pernah mendapatkan penjelasan terbuka, dari direksi maupun komisaris Pertamina mengenai perhitungan untung ruginya jika memiliki tanker VLCC tersebut.

"Kami tidak pernah mengetahui apakah tanker ini sudah dimasukkan dalam neraca keuangan Pertamina sebagai aset aktiva atau belum?" jelas anggota Fraksi Reformasi itu.

Cecep menambahkan, jika Dewan telah memperoleh gambaran rinci mengenai perhitungan bisnis VLCC tersebut tentu akan mendapatkan perbandingan yang realistis. Sebab, opini yang

berkembang semakin membingungkan. Untuk itu, direksi Pertamina harus menjelaskan secara terbuka kepada publik.

Yang mengherankan DPR, lanjut Cecep adalah alasan direksi baru membatalkan emisi obligasi PT Pertamina Tongkang US\$150 juta. Padahal, menurut rencana direksi lama, hasil dari penerbitan obligasi itu akan dipakai untuk membiayai pembangunan 12 tanker termasuk dua VLCC itu.

Apalagi, pada 2003 peringkat Pertamina cukup baik dan bunganya masih menarik karena tingkat pengembalian investasi dari kapal itu mencapai 11,83%.

Selain itu, ada tawaran lain dari Korean Exim Bank dan Mitsubishi dengan pola *bare boat hire purchase* (BBHP), yakni Pertamina menyewa kapal dari bank selama delapan tahun dan di akhir kontrak menjadi milik Pertamina dengan hanya bunga 8%.

Investasi migas Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah optimistis bisa memperoleh investasi baru di sektor minyak dan gas bumi (migas) pada 2004 sebesar US\$7,492 miliar (Rp67,5 triliun). Perkiraan tersebut terdiri atas investasi kegiatan eksplorasi sebesar US\$779 juta, pengembangan US\$2,097 miliar, produksi US\$3,931 miliar, dan administrasi

US\$683 juta.

Dalam keterangan tertulisnya akhir pekan lalu, menurut Purnomo, perkiraan angka investasi baru ini berarti meningkat dibandingkan 2003 sebesar US\$5,305 miliar.

Dia menambahkan, realisasi investasi baru di sektor migas sudah cukup besar. Pada 2002 misalnya, mencapai US\$5,438 miliar, 2001 mencapai US\$4,202 miliar, 2002 US\$3,921 miliar, 1999 US\$4,048 miliar, 1998 US\$4,418 miliar, dan 1997 US\$4,772 miliar.

Hal itu diperkirakan akan turut meningkatkan cadangan minyak mentah nasional menjadi 10,82 miliar barel, naik dibandingkan tahun sebelumnya 9,82 miliar barel. Hal serupa juga terjadi pada cadangan gas nasional yang mencapai 218,13 triliun kaki kubik (TCF), naik dibandingkan 2003 sebesar 198,13 TCF.

Peningkatan investasi tersebut juga tercermin dengan beroperasinya 27 kontraktor wilayah kerja migas tahun ini atau meningkat 12 kontrak wilayah kerja migas dari tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, kalangan investor yang tergabung dalam Indonesia Petroleum Association (IPA) dan Kadin, menilai iklim investasi migas akan semakin baik jika dua peraturan pemerintah (PP) tentang kegiatan usaha hulu dan hilir migas diterbitkan tahun ini juga. Kini kedua draf PP hulu dan hilir migas tersebut masih berada di Sekretariat Negara menunggu persetujuan Presiden.

"Diharapkan dengan investasi yang terus meningkat ini produksi minyak kita kembali mendekati 1,2 juta barel per hari (bph) dalam dua sampai tiga tahun mendatang," kata Menteri ES-DM. (FL/Wis/E-2)

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
--	---

KODE : LISTRIK GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MIGAS UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 2												TÁHUN 2004																		

KPPU usut tender tanker Pertamina

JAKARTA (Bisnis): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memproses laporan mengenai dugaan persekongkolan dalam tender penjualan dua kapal super tanker PT Pertamina, termasuk penunjukan langsung Goldman Sachs sebagai penasihat Pertamina.

"Tergantung bagaimana laporan yang masuk ke KPPU. Jika sudah masuk, kami akan memproses laporan tersebut," ujar Ketua KPPU Sutrisno Iwanto kepada *Bisnis* kemarin.

Dalam proses tender penjualan super tanker itu, KPPU menyoroti tiga hal terkait proses tender penjualan kapal super tanker Pertamina karena bersinggungan dengan UU No.5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli.

Pertama, dalam penentuan pemenang tender terindikasi adanya persekongkolan di mana pemenangnya hanya memberikan harga lebih rendah dari calon pembeli lainnya.

Kedua, Goldman Sachs sebagai penasihat keuangan Pertamina dalam penjualan tanker ini mempunyai saham di Frontline sehingga terjadi benturan kepentingan.

Ketiga, penunjukan Goldman Sachs sebagai penasihat keuangan di mana prosesnya harus diumumkan secara terbuka agar transparan dan memberikan akses yang sama kepada semua peserta yang mengikuti tender itu.

Penjualan dua tanker Pertamina menandai badai karena prosesnya yang jang-

gal. Ketika memilih penasihat keuangan, Pertamina diketahui menunjuk langsung Goldman dengan *fee* 2% atau sekitar Rp34 miliar. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Goldman menggandeng PT Corfina Multikreasi.

Goldman juga pemilik sekitar 1,87% saham di Frontline yang dipilih sebagai pemenang tender kendati Essar Shipping Ltd (India) menduduki peringkat tertinggi dalam penilaian bobot tender. Essar disebut-sebut menawarkan lebih mahal US\$4 juta, namun ada juga yang menyebut Frontline lebih tinggi US\$1 juta.

Otto Geo Diwara, Ketua Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) meminta KPPU untuk segera mengusut proses tender itu. Menurut dia, kasus itu segera dilaporkan ke KPPU setelah melihat proses pemeriksaan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan lambat.

Dalam laporan itu, tuturnya, SPPSI meminta KPPU untuk meneliti beberapa hal a.l. *pertama*, adanya penunjukan langsung Goldman sebagai penasihat Pertamina dalam penjualan tanker.

"Ini sudah jelas bahwa tidak ada tender secara terbuka dalam penunjukan penasihat keuangan. Kami minta KPPU mengusut hal itu," ujarnya.

Kedua, jika KPPU menemukan adanya penyimpangan prosedur dalam tender itu, lebih baik yang didenda adalah perorangan.

Ketiga, KPPU harus mengusut alasan Pertamina memenangkan Frontline padahal dalam *shortlisted* dengan bobot tertinggi, Frontline menduduki posisi kedua setelah Essar Shipping Ltd.

"Apakah dengan adanya kepemilikan Goldman di Frontline lantas memenangkan Frontline," ujarnya.

Otto menilai Meneg BUMN Laksamana Sukardi sebagai Komisaris Utama Pertamina mestinya mengetahui posisi Frontline dan Essar. Namun, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan Laksamana tidak mengetahui realisasi penjualan itu jika direksi tidak melaporkan. "Ini artinya, konspirasinya makin kuat."

Corfina diusut

Otto menegaskan SPPSI juga meminta PT Corfina Multikreasi yang masuk dalam Working Group List juga diusut untuk mengetahui peranan Corfina dalam tender tanker ini.

"Yang terpenting adalah berapa *fee* yang diterima Corfina dalam penjualan tanker ini," katanya.

Menurut data Working Group List yang disampaikan Goldman ke Pertamina pada Mei 2004 jelas mencantumkan nama dua eksekutif Corfina itu yaitu Suryanto Wijaya dan Eric Burhan.

Eric Burhan yang dimintai penjelasan perihal keterlibatan Corfina, tidak dapat dihubungi.

Sebelumnya Corfina menyatakan keterlibatan mereka hanya sebatas memberikan masukan mengenai perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia.

Tetapi seorang in-

6

vestment banker yang biasa mengikuti proses divestasi BUMN menyatakan hanya pihak yang mendapat mandat resmi dari klien yang lazimnya terlibat di Working Group.

"Sebab kalau di Working Group itu, pasti semua rekomendasi diketahui para pihak, jadi *inner circle*. Mestinya Goldman dan Pertamina menjelaskan secara gamblang posisi Corfina ini," ujarnya.

SP Pertamina mencurigai Corfina hanya kendaraan yang dipakai untuk membagi-bagi *fee* penjualan tanker Pertamina ke pihak tertentu.

Ketika *Bisnis* meminta konfirmasi, Direktur Keuangan Pertamina Alfred H Rohimone dan Ketua Tim Divestasi VLCC Andri T Hidayat tidak menjawab telepon selulernya. *Managing director* Goldman Sachs (Singapore) Pte Richard Ong pun tidak bisa dihubungi.

Boediono-Purnomo

Sementara itu, SPPSI kemarin menyebutkan keputusan komisaris PT Pertamina No.006/ KPTS/K/DK/2008 tanggal 23 Oktober 2003 tentang penunjukan penasihat ahli komisaris kepada Boediono (Menkeu) dengan tugas memberi nasihat dan masukan mengenai keuangan dalam kaitan subsidi BBM dan pengembangan usaha.

Keputusan No.005/KPTS/K/DK/2003 tanggal 23 Oktober 2003 menunjuk Purnomo Yusgiantoro (Menteri ESDM) dengan tugas memberi nasihat dan masukan mengenai perkembangan pasar dan harga minyak mentah dunia.

Boediono dan Purnomo diberikan honorarium sama dengan komisaris utama serta biaya pelaksanaan tugas termasuk biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran komisaris Pertamina. Kedua surat keputusan itu diteken Laksamana. Berbekal kedua surat itu, menurut SPPSI, Boediono dan Purnomo mendapat sekitar Rp75 juta setiap bulan dari Pertamina.

Untuk itu, SPPSI mendesak Laksamana mundur dari komisaris utama Pertamina. (adn/dle/wiw/ya)

6

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 10	
TAHUN 2004	

■ Serikat Pekerja Sektor Migas

Pernyataan SPPSI Soal Tanker Tak Wakili Aspirasi Sebagian Besar Pekerja Pertamina

Jakarta, NERACA

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) III, Ari Prawoto Mulyono menyatakan, pernyataan Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) yang menentang penjualan kapal tersebut, sama sekali tidak mewakili aspirasi sebagian besar pekerja Pertamina yang tergabung dalam serikat pekerja.

"Pernyataan SPPSI itu tidak mewakili aspirasi seluruh SP Pertamina. Ini hanya sebagian kecil saja," kata Ari, kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pernyataan Ari tersebut disampaikan menyusul makin gencarnya SPPSI Pertamina yang disampaikan melalui media massa berkaitan dengan kekisruhan penjualan tanker Pertamina jenis VLCC (*Very Large Crude Carrier*). Dikatakan, Serikat Pekerja UPMS III merupakan serikat pekerja yang independen dengan jumlah anggota sebanyak 1.200 orang atau sekitar 80 persen dari karyawan di ling-

kungan UPMS III (Jakarta, Banten dan Jawa Barat) yang total jumlahnya mencapai 1.700 orang.

Sedangkan untuk SPPSI itu, menurut dia hanya bagian kecil saja dari SP di Pertamina mengingat jumlah anggotanya paling sekitar 100 orang. "Sebagian besar dari SP itu tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Ada sekitar 12 SP yang bergabung dalam FSPPB termasuk SPPSI," katanya.

Menurut Ari, sebaiknya serikat pekerja bersikap independen namun tetap kritis. Ia berpendapat, ketimbang mempersoalkan penjualan tanker, masih banyak tugas lain dari SP dalam rangka memperjuangkan nasib pekerja Pertamina.

"Saya kira ini lebih tepat dari pada mempersoalkan sesuatu yang kita sendiri belum tentu benar. Lebih dari itu, justru polemik ini bisa mengancam keutuhan dan kekompakan pekerja. Saya khawatir, dengan terus menerus

mempersoalkan tanker, SP justru terpancing pihak luar yang bermaksud merusak Pertamina. Padahal kita semua sedang berjuang memperbaiki citra Pertamina yang kini telah berubah menjadi perseoran terbatas yang dituntut mencetak untung yang sebanyak-banyaknya," tutur Ari.

Soal penjualan tanker itu sendiri, Ari mengaku yakin, pimpinan Pertamina tidak akan mengorbankan pekerjaannya jika yang dilakukannya bukan sesuatu yang terbaik. Di tengah era yang segala sesuatunya serba terbuka, kecil kemungkinan pimpinan Pertamina berani melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan mereka pribadi dan institusi Pertamina.

"Terlampau besar resikonya kalau mereka (direksi) mau main-main," tuturnya.

Dikatakannya, penjualan tanker yang dilakukan pihak direksi Pertamina saat ini sudah benar karena akan memberikan keuntungan yang cukup besar buat perusahaan. Tapi bila itu dilaksana-

kan beberapa bulan atau tahun ke depan tentunya banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, beberapa bulan ke depan itu ada rencana dari pihak Cina untuk mengeksport besi-besi tuanya dalam jumlah besar termasuk ke Indonesia. Kalau itu berjalan diprediksikan bisa menekan harga jual kapal tanker.

"Jadi keputusan direksi itu sudah tepat dan SP Pertamina UPMS III mendukung rencana penjualan tanker tersebut," kata Ari.

Sebetulnya menurut dia, dengan adanya keuntungan tersebut, tentunya dana yang dimiliki perusahaan jadi bertambah dan pada akhirnya juga akan berdampak terhadap perbaikan pendapatan bagi karyawan. "Bila perusahaan untung, tentu kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik sehingga nantinya juga akan memberikan dampak positif bagi karyawan seperti adanya tambahan pendapatan," tegasnya. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Pertamina, unions clash over lingo

The Jakarta Post
Jakarta

Controversy over the sale of two giant tankers continued over the weekend as activists and workers argued with the management of state oil and gas company Pertamina over the accounting terms used to denote the ships.

Pertamina's management insisted the two tankers, termed in the industry as Very Large Crude Carriers (VLCC), were the company's debts rather than assets, but activists and workers insisted they should be defined as assets.

Under the existing regulations, if the tankers are categorized as assets, Pertamina needs approval from the Ministry of Finance for the sale of the VLCCs. Press reports have suggested that the sale was

made without prior approval of the ministry.

The Professional Civil Society (MPM) and the Pertamina Workers Union (SPPSI) said the tankers, which are being built by South Korea's Hyundai, Heavy Industries, were the company's assets because they were paid for by Pertamina.

"The divestment of the vessels is not converting debt. The vessels are assets because Pertamina pays for them with its funds," Ismed Hasan Putro, chairman of MPM said over the weekend.

"Beside, construction of the vessels has progressed to 80 to 90 percent complete and the first tankers will be delivered in early July," Ismed said.

Otto Geo Diwara, the union's chairman, said the VLCCs had been put on the company's balance sheet as

"assets which are being developed".

"It is unlikely the money paid by Pertamina to Hyundai has not been converted into assets to match the balance sheet," Otto said in the union's press release on Sunday.

MPM and the union were commenting on a statement by chief commissioner of Pertamina Laksamana Sukardi on Friday, who insisted Pertamina had not sold tankers but debt.

"Please note, this is not selling the vessels, but selling the debt. Do not assume that these (the vessels) are our assets. This is to scrap debt," Laksamana, who is the state minister of state enterprises, was quoted by *Kompas* as saying.

Pertamina said earlier the vessels were sold to fix its cash flow problems and to repay debt. The company said cash

8

flows had reached critical levels due to higher crude prices.

MPM, however, said Pertamina did not borrow to purchase the vessels.

"Pertamina made a down payment and paid construction fees in installments using its own cash," Ismed said.

Under the previous management, Pertamina through its subsidiary Pertamina Tongkang planned to issue rupiah and dollar denominated bonds worth Rp 225 billion and \$90 million respectively in the local and international markets to finance ship purchases and for working capital.

However, the current management quickly canceled the bond issue plan and announced plans to sell the tankers.

Ismed said the decision to cancel bonds and loan from Korean Export Import Bank,

had worsened Pertamina's cash flow as it had to use internal funds to pay for the VLCCs' construction.

He said the Korean Export Import Bank had offered a low interest rate of 4.6 percent a year.

Maritime expert Raja Saut Gurning said although Pertamina would make a profit of \$28 million from the sale of each tanker, the company would have to set aside \$12.6 million a year, or \$35,000 a day, in its budget to charter a similar type of tanker to carry crude from Middle East to Cilacap, Central Java.

Pertamina owns the largest refinery in Cilacap, which is specially designed to process Arabian light crude. Arabian light crude makes up 45 percent of total imported crude into the country, which averages at 300,000 barrels a day.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

Pertamina sedang jadi sorotan. Apalagi kalau bukan gara-gara masalah penjualan kapal tanker raksasa. Di satu sisi, para wakil rakyat di DPR tak setuju, sementara pemerintah dan Pertamina tetap bersikukuh. Mereka beralasan bisnis inti Pertamina bukan di bidang jasa pengangkutan. "Kita ini perusahaan minyak, *oil and gas*," kata Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi. Berikut petikan wawancara Ariffi dengan wartawan *Koran Tempo* **Mustafa Ismail, Ali Nur Yasin, Retno Sulistyowati, Dara Meutia Uning**, dan fotografer **Santirta** di Jakarta, Jumat (25/6).

ARIFFI NAWAWI

DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

“Kalau Saya Sewa Lagi, Pecatlah Saya”

Sebetulnya kita hidup dalam kondisi *cash flow* yang kritis.

Kontroversi penjualan tanker ini makin ramai, mengapa?

Masalah ini kan dimulai dari persepsi terhadap direksi Pertamina sekarang, yang begitu negatif di mata masyarakat sehingga, apa pun yang dilakukan direksi, selalu salah. Tapi, kami tidak tinggal diam. Kami akan segera melakukan langkah-langkah klarifikasi. Seperti berita (Ariffi menyebut editorial sebuah surat kabar), bahwa penjualan tanker itu penuh dengan nuansa korupsi karena tender dimenangkan penawar kedua. Itu tidak benar. Saya kira itu kebohongan publik. Saya akan lakukan somasi (kepada media itu), karena itu kan mencemarkan nama baik Pertamina maupun direksi Pertamina.

Yang benar bagaimana?

Yang benar, Frontline itu memang pemenang paling tinggi, yakni sebesar US\$ 184 juta. Sedangkan penawar ke-

dua mengajukan US\$ 183 juta, itu pun tidak mau memenuhi *term and condition*. Juga, tidak mau membayar 20 persen *down payment*.

Kok, informasinya bisa berbeda?

Itu semua bersumber dari data-data yang dikeluarkan Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia pimpinan Otto Gewa Diwara. Otto juga melakukan kebohongan publik. Karena itu, akan kami permasalahkan. Dia harus bertanggung jawab dengan *statement* yang dia keluarkan selama ini, yang kebanyakan sangat bertentangan dengan perusahaan. Jadi, permasalahan pokoknya di situ sehingga, apa pun yang kita lakukan, persepsinya begitu. Dan persepsi itu salah.

Saya lihat, selama ini SP PSI sering mengganggu kebijakan direksi. Apa saja diganggu. Memindahkan orang juga diprotes. Padahal, kita kan biasa memindah-mindah orang. Kita melakukan tender dengan memenangkan yang tertinggi, diprotes juga.

Apakah direksi pernah mengecewakan mereka?

Saya tidak mau membahas masalah ini. Yang jelas, itulah yang dilakukan selama ini.

Serikat Pekerja Pertamina Seluruh

Indonesia memang termasuk yang paling menentang penjualan dua tanker raksasa itu. Menurut Ketua Umum SP PSI Otto Geo Diwara, penjualan kapal tanker raksasa dengan spesifikasi double hull tidak beralasan. "Faktanya, harga sewa tanker VLCC single hull sangat mahal," ujarnya.

Tidak hanya itu, serikat pekerja juga meminta dua anggota direksi Pertamina mengundurkan diri. Mereka menuding Direktur Utama Ariffi Nawawi dan Direktur Keuangan Alfred Rohimone melakukan kebohongan publik.

Pertamina memutuskan menjual dua kapal tanker raksasa, very large crude carrier (VLCC), seharga US\$ 184 juta kepada Frontline Ltd., perusahaan asal Swedia, yang menang tender penjualan itu. Kapal itu sendiri kini sedang dibikin di galangan kapal Hyundai Heavy Industries, Korea Selatan.

Sebenarnya, apa sih untung ruginya jualan tanker?

Saya akan kembali menjelaskan dari awal agar tidak sepotong-sepotong.

Pertama, tanker ini disetujui oleh dewan komisaris pada waktu direksi lama dengan konsep pembelian *build, bare, hire, and purchase* (BBHP). Artinya, menyewa tapi nanti 20 tahun kemudian setelah masa sewa habis, tanker itu akan menjadi milik kita. Selama bertahun-tahun, Pertamina menerapkan konsep itu. Setelah dilakukan tender dua tahun, pemenangnya adalah Mitsubishi.

Lalu?

Tapi kemudian, satu-dua bulan sebelum keputusan dilaksanakan, tiba-tiba diputuskan pelaksanaan dengan konsep lain, yaitu *direct purchase*, yang memakai *issue bond*. Itu pun bermasalah karena melalui anak perusahaan PT Pertamina Tongkang.

Kenapa tiba-tiba berubah?

Tanya dong sama mereka (direksi lama). Yang saya tahu, saya menerima keadaan bahwa konsep pembelian tanker kontrak melalui *direct purchase*. Ini sebenarnya sangat bertentangan dengan keputusan dewan komisaris. Dulu, kebijakan *direct purchase* jelas melanggar. Pakai *issue bond* pun melanggar, karena harus pakai izin komisaris. Tapi, kalau maunya begitu, saya harus kembalikan pada keputusan korporat.

Jangan lupa, kalau memilih *direct purchase*, kita harus bicara korporasi. Karena *direct purchase* itu kan berarti utang. Selama ini, kan orang bicara seperti Japan Marine. Kalau kita punya tanker, maka lebih untung kalau kita jual daripada dioperasikan. Iya, kalau

uangnya dari pemerintah, kita enak. Sekarang Pertamina kan perseroan terbatas.

Terus?

Karena ini sifatnya utang, maka harus dibicarakan dulu. Pertama kita lihat dari sisi *cash flow*. Utang Pertamina hingga akhir tahun lalu atau awal tahun ini mencapai Rp 17 triliun. Itu utang kepada pemerintah. Karena merupakan warisan, saya harus segera membayar.

Pada hal, saat ini *cash flow* kita juga terbatas. Sudah utangnya banyak, *cash flow* sangat terbatas. Tapi, saya *nggak* bisa sebutkan karena berkaitan dengan masalah impor.

Dengan *cash flow* yang terbatas itu Pertamina masih menanggung beban impor BBM yang mesti dibayar 1,5 tahun mendatang, setelah selesai diaudit BPK. Itu pun hanya dibayar 70 persen dari harga US\$ 22 per barel. Ya, kita *empot-empotan* terus mulai Januari sampai Juni ini.

Sebetulnya, kita sudah mengalami kesulitan *cash flow* saat ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah selama 30-an tahun, Pertamina buka L/C tetapi tidak diakui. Kami sudah bolak-balik bicara ke pemerintah, tapi *nggak* digubris.

Sampai Mei lalu, akhirnya kami minta tolong Komisi VIII DPR dan ditanggapi positif. Akhirnya, pemerintah dipanggil dan diminta membayar *at cost* 95 persen, kalau harganya US\$ 35 per barel. Tapi, kalau harga di bawah itu, cukup dibayar 90 persen. Okelah, yang penting Pertamina sudah tertolong.

Tegasnya, *cash flow* Pertamina kritis sekali?

Kita memang hidup dalam kondisi demikian. Meskipun pemerintah telah membayar *at cost* sampai akhir tahun pun, *cash flow* Pertamina masih tetap krusial. Makanya, bila *fee* pengadaan BBM dibayar *at cost*, lalu *fee marketing* LNG dibayar, itu akan menolong sedikit. Pertamina bisa *survive* tahun ini meskipun pas-pasan.

Apa ruginya kalau tanker itu kita operasikan sendiri dan apa untungnya kalau dijual?

Kalau kita operasikan sendiri dengan *return* yang rendah, prediksi tarif US\$ 22-35 ribu per hari, maka kalau dihitung semua *cost*, misalnya sewa operator, bayar dok, bayar bunga, dan semua macam biaya, jatuhnya menurut hitung-hitungan Goldman and Sachs sekitar US\$ 35.700 per hari. Ka-

lau *nggak*, itu akan rugi. Itu pun dengan *grade* rendah. Jangan lupa, sebenarnya tanker itu bisa disewakan dengan *grade* yang lebih tinggi. Tapi, pemerintah pasti *nggak* mau kan? Padahal, kalau saya jual, saya kan bisa menyewa atau carter dengan tarif US\$ 20-22 ribu per hari untuk *single hull*. Itu murah. Kalau *single hull* baru, harganya tidak sampai US\$ 30 ribu per hari. Sistem sewa seperti ini tidak ada masalah.

Bukannya nanti pada 2010 tanker jenis *single hull* tidak diperbolehkan lagi?

Lho, *single hull* itu masih berlaku sampai 2010, kan menurut keputusan IMO (International Maritime Organization). Jadi, tidak usah dipermasalahkan. Kalau sewa itu lebih murah. Sebaliknya, bila tanker itu saya pertahankan (tidak dijual), *cash flow* saya negatif terus.

Kalau kita punya tanker, kan kita bisa menyewakan kepada pihak lain yang tentunya mendatangkan keuntungan?

Kita ini perusahaan minyak, *oil and gas*. Bukan perusahaan angkutan yang menguasai komoditas dunia. Pertamina tidak akan menjadi perusahaan seperti itu karena kita tidak menguasai komoditas internasional. Pelayanan kita baru domestik.

Kita tidak bisa ekspansi?

Belum bisa. Kalau mengoperasikan sendiri, kita harus menguasai komoditas internasional. Tapi, kita tidak fokus ke perusahaan (seperti) itu.

Kalau dijual, berapa keuntungan Pertamina?

Kalau saya jual, Pertamina untung US\$ 54 juta.

Ini kan Frontline yang membeli. Nanti disewa lagi oleh Pertamina?

Tidak. Saya jamin. Kalau saya sewa lagi, pecatlah saya. Sewa tanker itu mahal karena *double hull*.

Mengapa Pertamina tahu-tahu menunjuk Goldman and Sachs sebagai konsultan penjualan tanker?

Pada pertengahan Mei 2004, direksi maupun komisaris memutuskan untuk menjual tanker. Sedangkan Juli sudah harus diserahkan. Tidak ada waktu untuk tender.

Berapa tarifnya?

Kalau menjual aset begini paling satu persen. Itu sudah normal standar. Penjualan semacam ini harus pakai konsultan dan membayar sesuai dengan tarif internasional.

Diduga ada konflik kepentingan antara Frontline dan Goldman and Sachs?

Nggak ada. Frontline itu *listing* di New York. Tidak ada kepentingan.

Anda tidak terlalu murah menjual tanker?

Tidak. Bahkan lebih tinggi dari yang di lapangan.

Pernah terbetik niat untuk mencari informasi mengapa waktu itu beli, bukan sewa?

Tidak. Saya tidak mau membuka masalah-masalah lama. Tapi, karena sekarang saya dipojokkan, saya terpaksa menceritakan dari nol.

Dari penjualan itu Pertamina mendapatkan tambahan *cash flow* Rp 1,9 triliun, itu kan kecil untuk saat ini?

Siapa bilang kecil? Besar itu.

Krisis keuangan baru terungkap akhir-akhir ini. Dulu sering Pertamina disebut untung, misalnya pernah mencapai Rp 7 triliun?

Yang dilaporkan, Pertamina selalu untung, tapi tidak pernah diceritakan utangnya. Utangnya besar sekali. Kita mewarisi suatu utang dengan *cash flow* yang sangat minim.

Dengan kesulitan keuangan seperti ini bagaimana kesiapan untuk menjadi persero?

Makanya, kita harus selesaikan dengan sebaik-baiknya. Antara lain dengan meningkatkan cadangan produksi *up stream*, supaya meningkatkan *revenue*-nya. Untuk di *down stream*, kami sekadar mempertahankan *market share*. Aturan mainnya kita tegakkan.

Berapa lama Anda bisa keluar dari krisis ini?



Saya yakin tahun depan. Tahun ini masih *survival*-lah.

* * *

Bukan hanya dalam masalah penjualan dua tanker raksasa, Pertamina dikecam. Kenaikan gaji direksi yang mencapai 50 persen juga jadi gunjingan, apalagi kenaikannya berlaku surut, sejak Oktober 2003. Peningkatan gaji itu disetujui oleh komisaris utama Pertamina yang juga Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Dengan kenaikan itu, gaji take home pay yang diterima direksi Pertamina berkisar Rp 140-150 juta, sedangkan gaji komisaris berkisar Rp 50-75 juta.

* * *

Pertamina sedang krisis, tapi gaji direksi dinaikkan. Apa pertimbangannya?

Menaikkan gaji direksi itu keputusan lama. Baru sekarang dilaksanakan. Gaji Pertamina itu masih di bawah standar BUMN lain, sekitar Rp 70-80 juta kalau tidak salah.

Menaikkan gaji itu katanya keputusan lama. Kapan?

Sudah dibahas sejak awal tahun ini, kenapa kok (gaji direksi Pertamina) jauh di bawah BUMN lain.

Tapi, di masa Pak Abda'oe dan Martiono, gaji direksi cuma sekitar Rp 14 juta?

Status Pertamina sekarang PT. Tanggung jawabnya besar. Kalau dulu pemerintah yang bertanggung jawab. Utang tidak utang, sama saja.

Menaikkan gaji direksi itu tidak berpengaruh pada *cash flow*?
Nggak, karena itu hak.

Ketika menghadapi krisis tidak ada rencana untuk melakukan penyesuaian lagi?

Itu kan cara Anda berpikir. Saya tidak mau mengikuti cara Anda berpikir karena tanggung jawab direksi itu berat sekali.

Gaji karyawan sendiri bagaimana?

Kan sudah dinaikkan duluan.

* * *

Berbagai problem yang menghantam Pertamina akhir-akhir ini bukan berarti membuat Ariffi tidak bisa rileks. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Setiap hari dia berjalan kaki setengah jam mengelilingi kompleks rumahnya. "Sekarang agak berkurang," kata arek Malang jebolan ITB ini.

Banyak pikiran juga tidak membuat tensi darahnya naik. "Biasa saja," ujarnya. Ariffi tetap bisa tidur nyenyak. "Alhamdulillah, saya gampang tidur," kata pria yang gemar menonton Akademi Fantasi Indosiar (AFI) dan menjagokan Haikal ini.

* * *

Apakah masalah-masalah seperti ini mengganggu kerja Anda?

Sangat mengganggu. Terus terang, konsentrasi saya sangat terganggu. Apalagi dengan pemberitaan yang tidak proporsional.

Bagaimana dengan keluarga di rumah?

Sudah saya jelaskan. Mereka mengerti. ●

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

KISRUH PENJUALAN TANKER PERTAMINA

Pernyataan Laksamana Diprotes

"Setidaknya kapal tanker itu dicatat dengan istilah *work in progress* di neraca Pertamina."

JAKARTA — Gelombang protes bermunculan menyusul pernyataan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi mengenai penjualan tanker raksasa PT Pertamina (Persero) akhir pekan lalu. Sebagian besar menolak penjelasan Laksamana yang juga menjabat sebagai komisaris utama perusahaan minyak nasional yang menyatakan penjualan tanker merupakan pengalihan utang.

Masyarakat Profesional Madani yang dipimpin Ismed Hasan Putro menilai, pernyataan Menteri BUMN itu menyesatkan dan mencerminkan sikap yang tidak profesional. "(Pernya-

taan itu) sulit dipahami akal sehat," kata Ismed dalam siaran pers kepada koran ini kemarin.

Dia menjelaskan, pembelian kapal melalui utang yang tidak tercatat dalam neraca Pertamina adalah mustahil. Alasannya, dari segi akuntansi, jika muncul utang di sisi pasiva, otomatis harus dicari pula padanannya di sisi aktiva. "Setidaknya kapal tanker itu dicatat dengan istilah *work in progress* di neraca Pertamina," ujarnya.

Kecaman serupa juga dikemukakan Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia pimpinan Otto Geo Diwara. Menurut Otto Geo Diwara, pembayaran cicilan pembelian kapal oleh Pertamina seharusnya dikonversi menjadi aset atau aktiva agar neraca perusahaan menjadi seimbang. Dia juga menolak penjelasan yang menyatakan bahwa penjualan itu merupakan pengalihan utang.

Menurut Otto, kontrak pembelian kapal tanker antara Pertamina dengan Hyundai Heavy In-

dustries meliputi hak dan kewajiban, bukan perjanjian utang piutang. Selain itu, perjanjian pengalihan utang (novasi) seharusnya melibatkan tiga pihak, yakni kreditor, debitor, dan pihak yang menerima pengalihan.

"Perjanjian yang ada sekarang hanya melibatkan Pertamina dan Frontline Ltd. (pemenang tender penjualan kapal), tanpa melibatkan Hyundai sama sekali," ujarnya, dalam keterangan persnya.

Dia juga merujuk pada perjanjian jual-beli yang ditandatangani Pertamina dan Frontline. Perjanjian itu menekankan bahwa Frontline akan menyerahkan uang ke Pertamina, dan perusahaan minyak negara itu akan menyerahkan kapal ke pemenang tender itu. Serah terima itu dilakukan setelah Hyundai menyerahkan pula kapal tanker tersebut ke Pertamina. "Secara yuridis, kapal tanker yang diterima dari Hyundai menjadi milik Pertamina, baru diserahkan ke Frontline," katanya.

Otto juga mempertanyakan penunjukan Menteri Keuangan Boediono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro sebagai penasihat ahli komisaris Pertamina oleh Laksamana. Penunjukan itu tertuang dalam Surat keputusan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor 005/KPTS/K/DK/2003 dan Nomor 006/KPTS/K/DK/2003, dan ditandatangani Komisaris Utama pada 23 Oktober 2003.

Tim penasihat bertugas memberikan nasihat dan masukan kepada komisaris, sesuai bidang yang dikuasainya. Boediono bertugas memberi nasihat dan masukan mengenai keuangan dalam kaitan dengan subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengembangan usaha. Sedangkan Purnomo memberi nasihat dan masukan mengenai perkembangan pasar dan harga minyak mentah dunia dan tugas-tugas penyediaan dan pelavanan

BBM di dalam negeri dalam kaitannya dengan subsidi pemerintah.

Dalam surat keputusan itu, ditetapkan bahwa honorarium bagi para penasihat ahli setara dengan gaji komisaris utama. Selain itu, biaya pelaksanaan tugas penasihat ahli, termasuk biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri dibebankan pada anggaran komisaris Pertamina.

Menurut Otto, penunjukan itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Pertamina setelah berubah status menjadi persero. "Mana ada, posisi penasihat ahli dalam struktur organisasi komisaris Pertamina?" ujarnya.

Otto menilai, penunjukan itu merupakan perampokan, karena setidaknya perusahaan harus membayar sekitar Rp 75 juta setiap bulan bagi setiap penasihat ahli ini.

Sementara itu, kelompok lain di Pertamina yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif Pertamina pimpinan Capt.

H.M. Djafar memberikan dukungan atas kebijakan penjualan tanker oleh direksi. Mereka menilai pembatalan pembelian tanker sudah tepat karena perusahaan mengalami krisis keuangan.

Namun, meskipun memberikan dukungan penjualan tanker raksasa, serikat pekerja itu meminta direksi tidak membatalkan pembangunan empat unit kapal yang sedang dikerjakan di galangan kapal dalam negeri. Mereka juga ingin keuntungan dari penjualan kapal dialokasikan untuk meningkatkan investasi bisnis perkapalan.

"Keuntungan (hasil penjualan tanker raksasa) bisa digunakan untuk membeli kapal yang sesuai dengan standar internasional dan yang didesain sesuai dengan kondisi perairan Indonesia," tegas Djafar. Selain itu, kata dia, pekerja mendesak agar direksi segera merampungkan rencana untuk memperkuat armada perkapalan domestik, seperti yang dijanjikan.

● dara meutia uning

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 1	
TAHUN 2004	

Laksamana Mundurlah!

Satu persatu orang dekat Megawati dirudung masalah. Kali ini Ketua Mega Centre Laksamana Sukardi diprotes berkaitan dengan posisinya sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Komisaris Utama PT Pertamina. Laks dicurigai menyimpan sesuatu di balik izin yang diberikannya dalam penjualan tanker Pertamina.

LEMBAGA pemantau perminyakan dan energi *Petromine Watch Indonesia* (PWI) mendesak agar Laksamana mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina. "Laksamana, mundurlah," kata Ketua PWI Pontas Limbong. PWI kemarin menggelar

jumpa pers khusus untuk menyoroti penjualan dua VLCC (*very large crude carrier*) milik PT Pertamina yang disetujui Laks.

"Jika melihat keberpihakan Laksamana yang setuju menjual kapal tanker raksasa kepada swasta,

kelihatan sekali bahwa Laksamana merupakan orang Pertamina yang jadi Meneg BUMN," ujar Pontas Limbong kepada wartawan, kemarin.

Lebih jauh Limbong menilai, penjualan kapal tanker raksasa milik Pertamina itu memiliki nuansa politik dan bisa jadi berhubungan dengan pemilihan presiden 5 Juli mendatang. Hal itu didasarkan pada posisi Laksamana yang juga menjadi ketua Mega Centre. "Posisi rangkap jabatan itulah yang menyebabkan *conflict of interest*," tambahnya.

Limbong mengatakan, sebagai Meneg BUMN seharusnya Laksamana bertugas mengawasi kinerja dan sepak terjang BUMN, termasuk Pertamina. Bagaimana mungkin Laksamana mengawasi Pertamina jika dirinya sendiri ada di dalamnya. Seperti jeruk makan jeruk, begitulah posisi rangkap jabatan itu yang kian jadi tidak jelas.

"Bagaimana seorang menteri BUMN dapat melakukan pengawasan kepada

Pertamina, jika komisaris utamanya merupakan orang yang sama dengan si pengawas," katanya.

Karena itu, Limbong menilai, langkah penjualan kapal tanker minyak raksasa Pertamina mungkin ada kaitannya dengan kepentingan politik dalam rangka mencari dana kampanye Megawati dalam pemilihan presiden 5 Juli nanti.

"Sejak awal sebenarnya sudah banyak yang mempertanyakan posisi Laksamana Sukardi. Ketika Pertamina berubah status dari badan hukum menjadi persero dan

dia jadi komisaris utama, sudah banyak orang ikut. Karena kemungkinan timbul benturan kepentingan sangat besar. Polemik penjualan kapal tanker raksasa Pertamina ini menjadi kenyataan. DPR dan Menkeu menolak penjualan itu namun Laksamana Sukardi menyetujuinya," ungkap Limbong.

Limbong menambahkan, penolakan sejumlah petinggi negara itu karena ketidakjelasan status Laksamana. Sebab, menurutnya, jabatan rangkap itu jelas bertentangan dengan upaya pemerintah untuk membangun *good governance* dan *good corporate governance*.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini Soewandi juga dirudung masalah. Komisaris Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Nurdin Halid menuding Rini telah melakukan kebohongan

publik dalam kasus gula impor ilegal. Nurdin tengah mempersiapkan somasi dan gugatan.

Tim kuasa hukum Nurdin menyebut

Rini telah memberi keterangan palsu saat membantah pertemuan dengan Nurdin terkait pembahasan pengadaan gula. Hari Selasa besok (29/6) Eggy Sudjana yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Nurdin akan mendatangi Mabes Polri untuk mendaftarkan gugatan itu.

"Selain ada permainan yang berusaha menyeret klien saya, Ibu Rini juga tidak tahu diri dengan tidak mengakui pertemuannya dengan Nurdin Halid," ujarnya. Dia berharap polisi segera mengambil tindakan tegas terhadap Rini.

Jika polisi tak segera memanggil atau memeriksa Rini, lanjut Eggy, bukan tidak mungkin muncul dugaan bahwa pihak polisi kongkalingkong dengan kubu Rini.

"Artinya, kalau polisi tidak segera memanggil dan mengorek keterangan Menperindag, maka polisi bisa dikatakan terlibat dalam upaya menggembosi Wiranto yang tengah bersaing dalam pemilihan presiden," tambahnya. Sepeti diketahui, Wiranto adalah capres dari Partai Golkar,

sementara Nurdin Halid adalah salah seorang pentolan Golkar dari Sulawesi Selatan yang masih duduk di kursi DPR. Belakangan, muncul isu yang menyebutkan kasus gula impor ilegal yang menyeret nama Nurdin dipakai kelompok tertentu untuk menggembosi Wiranto.

Selain Nurdin, adiknya yang juga Kadiv Perdagangan Inkuad, Ahmad Waris Halid pun tengah menyiapkan berkas gugatan terhadap Rini.

Direktur II Ekonomi dan Khusus (Eksus) Mabes Polri Brigjen Samuel Ismoko yang dihubungi kemarin mengatakan belum mendengar rencana pemanggilan Rini ke Mabes Polri.

Dia kembali menyatakan bahwa polisi telah menangkap tersangka pemalsu dokumen impor, Effendi Kemek dan tengah mengejar seorang tersangka berinisial J. Hari ini polisi akan memeriksa lima saksi. "Kelima saksi itu merupakan orang-orang dari konsorsium," timpalnya singkat. ■ MIF/GPG

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

Pembeli Tanker Tak Otomatis Dapat Proyek

Jakarta, Sinar Harapan

Pembeli super tanker Pertamina Frontline Ltd tidak akan secara otomatis mendapatkan proyek atau kontrak angkutan dari Pertamina. Dalam penjualan kapal itu ditetapkan sistem jual putus, artinya kapal dijual dan tidak dikaitkan dengan proyek angkutan minyak Pertamina.

Demikian Kepala Divisi Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat Pertamina (Hupmas) Pertamina, Hanung Budya kepada SH di Jakarta, Sabtu (26/6).

Hanung mengakui, selama ini ada kesan dalam transaksi penjualan kapal super tanker tersebut selalu dikaitkan dengan order angkutan di Pertamina. Kalau tidak dijual, memang Pertamina akan mengoperasikan untuk mengangkut minyak mentah untuk kepentingan perusahaan. Namun, setelah dijual tidak ada kaitan lagi dengan Pertamina.

Menurut dia, walaupun pemilik baru kapal tanker ingin masuk di Pertamina, maka mereka sama saja dengan pemilik kapal lainnya. "Mereka harus ikut tender dan belum tentu dipakai oleh Pertamina," tuturnya.

Menjawab pertanyaan tentang Pertamina akan didikte oleh mafia kapal dalam menentukan sewa, Hanung mengatakan, kondisi sekarang berbeda dengan zaman dulu. Pada masa kejayaan Pertamina dulu, memang mafia itu memiliki pengaruh besar. Sekarang, meskipun Pertamina tidak memiliki kapal tanker, banyak alternatif lain.

"Karenanya, mafia kapal yang disebut-sebut akan mendikte Pertamina dalam menentukan sewa seperti ini tidak akan terjadi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Hanung juga menjelaskan bahwa penjualan tanker Pertamina sudah final dan tidak perlu diributkan lagi. Proses penjualan sudah mendekati tahap penyelesaian pembayaran yang direncanakan paling lambat sebelum pertengahan Juli 2004. "Pemenang tender Frontline Ltd sudah membayar uang muka dan akan menyelesaikan pembayaran sisa sebelum kapal diserahkan," katanya.

Keuangan Pertamina

Di bagian lain, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi menegaskan penjualan tanker VLCC (*Very Large Crude Carrier*) itu untuk menyelamatkan keuangan Pertamina. Pembelian kapal tanker di biayai oleh utang padahal Pertamina harus fokus pada kegiatan eksplorasi. Selain itu, melanjutkan pembelian maka Pertamina harus menyediakan dana tambahan US\$ 65 juta.

"Kita bukan jual tanker, tapi jual utang. Kita masih utang, jangan dipikir kapal sudah aset Pertamina, tinggal utangnya belum dibukukan," kata Laksamana sebelum mengadakan pertemuan dengan pengurus Kadin Indonesia, Jumat (26/6) di Jakarta.

Laksamana mengemukakan dengan kondisi keuangan Pertamina, sulit bagi perusahaan minyak tersebut mem-bail out perusahaan tanker yang begitu besar. Risikonya sangat besar.

Menurutnya, sesuai dengan UU, Pertamina harus konsentrasi di bisnis minyak dan gas dengan demikian menekankan pada kegiatan eksplorasi. Pada satu pihak kapal dibutuhkan, tapi tidak bisa membangun perusahaan perkapalan dengan utang yang besar tanpa eksplorasi.

Dikatakannya tidak ada perusahaan minyak besar di dunia yang mengoperasikan tanker sendiri. Perusahaan di regional hanya Petronas yang memiliki anak perusahaan perkapalan, itupun karena secara strategis Petronas harus membillout perusahaan perkapalan tadi. "Secara perseroan sekarang harus fokus pada minyak dan gas. Kalau saya harus utang US\$ 280-an juta, saya akan mengalokasikan utang itu untuk eksplorasi bukan untuk beli tanker," katanya.

Dia menekankan apabila pembelian terus dilakukan maka akan menyulitkan perusahaan karena Pertamina harus menyediakan dana tambahan US\$ 65 juta. "Uangnya dari mana. Semua berpikir tanker sudah jadi sudah kekayaan pemerintah. Itu utang sebetulnya yang akan memberatkan kondisi keuangan Pertamina," jelasnya.

Berkaitan dengan pemenang tender yang diduga bukan penawar tertinggi, Laksamana membantah. Menurutnya penawaran sudah dilakukan sesuai prosedur dan dime-

ngankan oleh penawar tertinggi. Beredar informasi bahwa Front Line Shipping Ltd itu hanya menawarkan US\$ 184 juta sedang-

kan Essaar Shipping Ltd menawarkan US\$ 188 juta

"Kalau kejadiannya seperti itu akan saya pecat direksi," tegasnya.

Laksamana juga menegaskan penjualan tanker tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan mengingat Pertamina adalah perusahaan perseroan. Bahkan Menteri Keuangan sudah memberi jawaban, tidak perlu menunggu persetujuan pihaknya.

Berkaitan dengan posisi Goldman Sachs sebagai investor Pertamina dan pemegang saham di Front Line, Laksamana menjawab dirinya tidak tahu. Namun dia mengemukakan Front Line merupakan perusahaan publik yang memiliki Goldman Funds Management dan tidak ada hubungannya. "Kalau go public semua orang boleh beli tapi bukan mayoritas atau signifikan material diatas 10 persen," katanya. (mis)

12

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 136 TAHUN 2004	

Boediono Semprit Pertamina

KASUS penjualan dua unit tanker raksasa Pertamina terus bergulir. Menteri Keuangan Boediono menegaskan, Pertamina seharusnya melapor ke Departemen Keuangan terlebih dahulu sebelum menjual dua tanker berbobot mati 260 ribu ton itu.

Konsultan tender yang ditunjuk Pertamina, Goldman Sachs, pekan lalu sudah memberikan rekomendasi kepada Pertamina agar menunjuk Frontline Ltd. dari Amerika Serikat sebagai pemenang

"Prinsipnya memang tak perlu izin, tetapi sebaiknya ada persetujuan proforma karena Pertamina masih dalam masa transisi menjadi perseroan," kata Boediono dalam rapat anggaran di Panitia Anggaran DPR, Rabu pekan lalu.

Dan penilaian kembali atau revaluasi seluruh aset Pertamina hingga kini belum tuntas. Jadi, jika suatu saat Badan Pemeriksa Keuangan

mengaudit penjualan tersebut dan ternyata ada proses yang salah, Pertamina harus bertanggung jawab mengganti kerugian negara.



tender karena memberikan harga penawaran tertinggi, US\$ 184 juta (Rp 1,65 triliun, kurs Rp 9.000 per dolar AS).

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>									
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	28	29 30 31						
HALAMAN : 7-4											TAHUN 2004

SP-FKPPA & Fortana dukung penjualan VLCC

JAKARTA (Bisnis): Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif Pertamina (SP-FKPPA) dan Forum Tenaga Kerja Pertamina (Fortana) mendukung penjualan kapal tanker raksasa (*very large crude carrier/VLCC*) milik PT Pertamina kepada Frontline Ltd.

Capt M. Djaffar, Ketua Umum SP-FKPPA, mengatakan sikap mereka itu telah dinyatakan secara terbuka pada 24 Mei yang intinya mendukung penjualan kapal VLCC oleh Pertamina sebanyak dua unit yang tengah diselesaikan pembangunannya di galangan Hyundai Heavy Industry, Ulsan, Korea.

"Kami mendukung keputusan direksi untuk menjual kapal tersebut," ungkap Djaffar dalam siaran pers yang diterima *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Sementara itu, dalam siaran pers yang ditandatangani ketua umumnya, Hasan Saman, Fortana juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan direksi Pertamina untuk menjual VLCC.

"Belakangan ini ada oknum yang mengatasnamakan organisasi tenaga kerja Pertamina. Padahal itu hanya kehendak kelompok dan golongan tertentu," ungkap Hasan.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Serikat Pekerja Per-

tamina Seluruh Indonesia (SP-PSI), Otto Geo Diwara, menuding ada kejanggalan dalam kebijakan Pertamina melepas kembali tanker VLCC itu. SP-PSI meminta agar DPR dan pemerintah membatalkan rencana penjualan itu.

Selanjutnya SP-FKPPA meminta agar pembangunan empat unit kapal yang sedang dibangun di galangan kapal dalam negeri tidak dibatalkan dengan alasan apapun.

Selain itu, forum tersebut meminta agar keuntungan yang diperoleh dari penjualan dua unit kapal VLCC agar dialokasikan untuk menambah investasi bisnis perkapalan, dengan membeli kapal-

kapal yang kondisinya sesuai standar internasional dan di desain sesuai kondisi perairan Indonesia.

Mereka juga meminta manajemen menyusun rencana memperkuat armada perkapalan, domestik yang merupakan perwujudan komitmen direksi Pertamina.

Menurut Djaffar, sebagian anggota SP FKPPA adalah pelaut yang membawa kapal tanker untuk melaksanakan tugas pendistribusian melalui laut, di segenap penjuru di Tanah Air.

Masalah di lingkungan Pertamina, khususnya perkapalan Pertamina, ujarnya, bukan hanya penjualan VLCC yang membesar karena dipicu

oleh faktor eksternal perkapalan, termasuk SP di luar SP FKPPA (Perkapalan).

SP-FKPPA juga meminta pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina agar dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana layaknya badan usaha, menyiapkan produk dan jasa berkualitas terbaik dan berdaya saing kuat untuk memuaskan pelanggan.

"Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama PT Pertamina dapat mensejajarkan diri dengan perusahaan minyak kelas dunia yang kuat di hulu dan hilir, serta tidak sampai tertinggal lebih jauh dari Petronas Malaysia," ungkapnya. (ea)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 2	
TAHUN 2004	

● **komentar**

Kurtubi
PENGAMAT PERMINYAKAN

**Dia Bisa
Diharapkan**

Dilihat dari pendidikan yang berlatar belakang *chemical engineering* dan pengalaman kerja di Pertamina yang sudah lama, bahkan pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pengolahan Pertamina, Ariffi Nawawi sudah klop dan pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Dari sisi profesionalisme, tak perlu diragukan lagi. Di samping itu, beliau punya dedikasi yang tinggi dan bisa diharapkan.

Mengenai kepemimpinannya, *style* beliau memang agak kalem. Bisa jadi, hal itu terkait dengan *setting* tugas Pertamina sekarang di bawah Undang-Undang Migas yang baru. Dengan undang-undang itu, Pertamina betul-betul diarahkan menjadi perusahaan berorientasi bisnis murni yang mempersempit ruang gerak beliau.

Sebelumnya, selain berbisnis, Pertamina juga dituntut memberikan pemasukan kepada negara dari sektor migas. Hanya saja, kewenangan Ariffi Nawawi jadi terbatas karena pemerintah tidak lagi memberi bantuan, meski dalam rangka memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnisnya.

Soal kelemahannya tentu ada. Beliau memang berpengalaman di kilang minyak di Petrokimia, tapi bidang tersebut hanya sebagian kecil dari dunia perminyakan.

● erwin dariyanto/trn

TEMPO/BERNARD CHANIAGO



15

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 3											TAHUN 2004																			

Pertamina Serahkan Ke Swasta Tangani Limbah B3

Masalah limbah yang sebelumnya sempat mencuat ke permukaan akibat keresahan warga sekitar pesisir yang takut mengganggu aktivitasnya sebagai nelayan, kini tidak lagi menjadi masalah besar.

Kasus yang beredar beberapa waktu lalu dengan tuntutan pencemaran lingkungan oleh masyarakat pesimemang kurang kuat, karena dalam kegiatan operasionalnya sangat memperhatikan hal-hal berkaitan dengan keselamatan kerja dan lingkungan dengan orientasi bisnis akrab lingkungan yang tidak hanya dilaksanakan untuk proses operasi, tetapi juga diaplikasikan terhadap produk yang dihasilkan. Bahkan Kebijakan ini juga diaplikasikan Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan yang telah memperoleh pengakuan ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan).

Dalam pengolahan limbah di kilang Balongan, Pertamina memiliki penyimpanan limbah yang cukup luas dan aman, meliputi pengolahan limbah cair, gas, dan *laydown area* untuk menampung sementara limbah padat.

Memang Pertamina menyimpulkan tumpukan limbah yang berjumlah hampir 16 ribu ton limbah jenis B3 (bahian beracun berbahaya) di unit pengolahan VI Balongan. Kini masalah itu sudah dapat diselesaikan dengan mulai dilaksanakannya pengiriman limbah *spent catalyst* Residue Catalytic Cracking (RCC) 15 dan *sludge* bentuk diolah di PT Persada Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Cileungsi, Jawa Barat.

Tahap pertama, rencananya jumlah limbah yang dikirimkan ke PT PPLI sebanyak 300 ton terdiri dari 250 ton *spent catalyst* RCC 15 dan 50 ton *sludge*. Pengolahan limbah yang masuk kategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) ini, menjadi perhatian utama manajemen PT Pertamina (Persero) terkait dengan tindak lanjut hasil evaluasi Proper yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Kerjasama pengolahan limbah dengan PT PPLI merupakan

program lanjutan yang sempat dihentikan pada era reformasi karena masalah administrasi. Penghentian kerjasama yang dilakukan sejak 1998 sampai 2004 telah mengakibatkan akumulasi jumlah *spent catalyst* dan *sludge* hingga mencapai 16.000 ton. Akumulasi limbah sebelumnya di simpan di *laydown area* kilang UP VI Balongan sesuai prosedur penyimpanan sementara limbah B3. Melalui kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi limbah B3 yang disimpan sementara di area kilang UP VI.

Menyangkut pelaksanaan pengelolaan limbah *sludge*, Pertamina sebelumnya telah bekerja sama dengan Pemda Indramayu. Limbah yang keekonomian diserahkan kepada Pemda, dikelola bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk Pemda. Namun, sampai kini tidak ada perusahaan yang mampu mengelola limbah seperti yang dilakukan oleh PT PPLI. Contohnya, pengelolaan limbah yang diserahkan kepada Semen Palimanan. Sampai kini baru mampu menyerap 144 ton, padahal jatah yang diberikan kepadanya 500 ton. Pertamina kedepan menginginkan agar ada perusahaan yang mampu mengelola limbah tersebut. Pertamina menginginkan kontrak untuk jangka panjang.

Pihak PPLI juga akan menerima pengiriman tahap kedua, yang direncanakan akan dilakukan bulan Agustus 2004 mendatang, diharapkan akumulasi limbah B3 dapat terangkut seluruhnya pada November 2004. Pengelolaan limbah B3 tidak dapat dilakukan sendiri oleh UP VI Balongan.

Ikuti Peraturan

Sejak beroperasi pada 1994 sampai sekarang, pengelolaan limbah UP VI Balongan dilakukan mengikuti peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah padat,

antara lain PP No. 19 tahun 1994 Jo PP No. 12 tahun 1995 tentang pengelolaan limbah B3 yang mengacu pada UU No. 4 tahun 1982. Disamping itu juga mengacu pada PP No. 18 tahun 1999 Jo PP No. 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3 yang mengacu pada UU No. 23 tahun 1997

Menurut jubar Pertamina, M. Harun, upaya-upaya pemanfaatan limbah B3 ke perusahaan lain di luar PT PPLI tetap dilakukan, di antaranya dengan PT Kramapadma untuk *spent catalyst* Aromatic Residual Hydro Demetalizer (ARHDM), dengan perusahaan beton Elmindo Bandung untuk *spent catalyst* RCC 15. Sedangkan *sludge* bekerjasama dengan industri pabrik kapur di Tegal, pabrik genteng Siliwangi dan perusahaan pengelola *sludge* CV Dwi di Bandung. Selain itu, UP VI Balongan telah menawarkan kerjasama ke Indocement Palimanan, Semen Cibinong dan Semen Gresik. Saat ini kerjasama masih dalam tahap uji coba.

"Untuk menepis isu KKN, kita akan transparan serta akan membuat kontrak yang tidak mengikat sehingga tidak bisa dikatakan KKN," kata Edi.

Berdasarkan penjelasan dan pengamatan secara langsung, Pertamina telah menjelaskan, limbah itu tidak berbahaya mengingat proses pembersihannya telah melalui banyak tahapan, sehingga setelah sampai di *lagoon* (tempat penampungan terakhir) sehingga diharapkan tidak berbahaya lagi. Selain itu, sebenarnya limbah belum diteliti secara benar sebagai bahan beracun dan berbahaya.

Pasokan BBM Aman

Pada kesempatan yang sama, M. Harun mengatakan, Pertamina tetap akan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan

pemilihan Presiden RI pada 5 Juli 2004 mendatang.

"Hingga saat ini Pertamina mempertahankan stok nasional di level 22 hari, dan akan ditingkatkan ke level 24 hari pada akhir bulan ini," katanya.

Namun, berkaitan dengan kelangkaan yang terjadi di beberapa wilayah, hal tersebut terjadi karena masalah yang terkait dengan kondisi laut (cuaca) yang mempengaruhi pergerakan tanker maupun masalah teknis yang terkait dengan pengaturan pola suplai.

"Sedangkan stok BBM sendiri berada pada level yang aman di seluruh depot/ instalasi Pertamina. Sejak dua minggu yang lalu masalah ini telah dapat teratasi dan posisi stok dapat dikembalikan ke level aman 22 hari," ujarnya.

Menurutnya, hingga kini seluruh jadwal penyediaan minyak mentah maupun produk kembali normal dan operasi kilang telah ditingkatkan hingga mendekati 100 persen kapasitas. "Hal ini memastikan posisi stok BBM nasional aman pada level 23-24 hari dan terjaminnya pasokan," ulasnya.

Berdasarkan evaluasi Pertamina menjelang dan saat kampanye Pemilu Legislatif (April 2004 lalu) maupun Pemilihan Presiden (5 Juli 2004) telah terjadi peningkatan volume penjualan premium dari rata-rata 41 ribu kilo liter per hari menjadi 43 ribu kilo liter per hari, naik sekitar 5 persen. Peningkatan ini masih wajar mengingat meningkatnya aktivitas masyarakat terkait dengan kegiatan Pemilu.

Harun mengatakan, peningkatan konsumsi juga terjadi untuk minyak solar sejalan dengan meningkatnya kebutuhan PLN sekitar 6 persen. Hal ini antara lain disebabkan tibanya musim kemarau di mana produktivitas PLTA menurun sehingga pasokan energi disubstitusi dari pembangkit lis-

trik berbahan bakar minyak solar," ungkapnya.

Meskipun secara nasional ketersediaan stok berada di level aman, Harun menegaskan, Pertamina tetap akan melaksanakan pengendalian volume distribusi agar tidak melewati kesepakatan yang ditetapkan DPR dalam APBN 2004. (CW-1)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2004

Minyak Mentah Cemari 3,5 km Pantai Indramayu

INDRAMAYU, (PR).-

Gumpalan minyak mentah (*crude oil*) diketahui terhampar dan mencemari pantai sepanjang 3,5 km di wilayah perairan laut Kabupaten Indramayu dari Pantai Karangsong hingga ke Singajaya. Selain itu, Tim Monitoring Ceceran Minyak (TMCM) yang melakukan pemantauan pencemaran di sepanjang 114 km di alur pantai Indramayu juga menemukan indikasi adanya korosi (pengeroposan) pada jalur pipa distribusi minyak, di samping abrasi pantai yang menghebat di beberapa wilayah.

Keterangan yang dihimpun "PR", Minggu (27/6), menyebutkan bahwa TMCM yang melakukan pemantauan selama sepekan terdiri atas Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup (DPLH), Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla), Pertamina UP VI Balongan, Pertamina DOH JBB, UPMS III Balongan, Danlanal Cirebon, Syahbandar, dan Kompi (Koalisi Masyarakat

Pesisir Indramayu). TMCM terbagi menjadi tiga wilayah *monitoring*, yakni Indramayu barat, tengah, dan timur.

Diperoleh keterangan, adanya ceceran minyak mentah sepanjang 3,5 km dari Pantai Karangsong hingga Singajaya merupakan hasil laporan TMCM Wilayah Tengah. Sementara TMCM Wilayah Timur dalam laporannya menginventarisasi terjadinya korosi (proses pengeroposan) pada jalur pipa di pinggir Pantai Majakerta hingga Pantai Tirtasmaya Kecamatan Juntinyuat.

Di Wilayah Barat, TMCM yang melakukan penyisiran laut dan pantai dari Ujung Gebang hingga Patrol Kec. Sukra menyatakan tidak menemukan adanya ceceran *crude oil* di kawasan tersebut. Meskipun begitu, mereka menyatakan bahwa di sepanjang jalur pantai tersebut terjadi abrasi yang cukup hebat.

Ketua KOMPI, H. Juhadi kepada wartawan membenarkan adanya temuan ceceran minyak mentah

yang relatif luas tersebut. "Tim *monitoring* memang menemukan ceceran *crude oil* di sepanjang pantai itu. Kami sudah buat berita acara, agar *crude oil* segera dibersihkan," ungkap kata H. Juhadi yang pada kesempatan itu didampingi Wakil Ketua Kompi Sudarsono, S.Pd.

Selain menemukan dan menginventarisasi berbagai masalah lingkungan tersebut, TMCM yang "menyapu" di wilayah tengah memperoleh laporan bahwa pekan sebelumnya terjadi kebocoran pipa minyak di lepas pantai wilayah Kecamatan Juntinyuat. "Hanya, TMCM belum bisa memastikan sumber keluarnya minyak berwarna hitam itu, apakah berasal dari pipa milik Pertamina atau ada sumber lain," ujar Juhadi.

Atas berbagai laporan hasil *monitoring* itu, TMCM telah meminta pihak terkait untuk melakukan penanggulangan. Selain itu, kepada para nelayan juga diminta untuk "menertibkan" perahu milik mere-

ka yang sengaja ditambatkan ke pipa Pertamina. TMCM mengkhawatirkan, jika terjadi angin kencang, perahu-perahu itu akan menghantam jaringan pipa dan berakibat terjadinya kebocoran.

Segera bersihkan

Bupati H. Irianto M.S. Syafiuddin yang dihubungi terpisah ketika diminta komentar adanya temuan itu menyatakan sependapat dengan Kompi. Ia meminta agar pihak yang paling berkompeten terkait dengan ceceran *crude oil*, segera melakukan pembersihan pantai yang tercemar itu. "Kalau ada temuan ceceran minyak mentah, sebaiknya jangan menunggu lama. Segera bersihkan agar masyarakat tidak dirugikan," ujar dia.

Ia mengaku sangat terkejut oleh adanya laporan itu. Sebab, menurutnya, dalam waktu yang tidak begitu lama di Pantai Karangsong sampai dengan Singajaya pernah dilakukan pembersihan ceceran minyak mentah. (A-96)***

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR **(JUN)** JUL AGST SEPT OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 **(28)** 29 30 31

HALAMAN : 1

TÁHUN 2004

Pertamina Mulai Kirim Lagi 300 Ton Limbah dari Kilang Balongan ke PPLI

Jakarta, NERACA

Limbah pembuangan katalis yang sejak 1998 menumpuk di Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat kini mulai dikirim lagi ke PT Persada Pemusnah Limbah Industri (PPLI). Pasalnya, limbah pembuangan katalis berupa *residue catalytic cracking* (RCC) 15 dan *sludge* sejak 1998 jumlahnya mencapai 16.000 ton menumpuk di areal kilang tersebut. "Limbah itu mulai dikirim ke PPLI untuk dimusnahkan. Pada tahap pertama, jumlah limbah yang dikirim sebanyak 300 ton yang terdiri dari 250 ton RCC 15 dan 50 ton *sludge*," kata Harun, akhir pekan lalu.

Seperti diberitakan *Neraca* sebelumnya, Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan menghadapi masalah serius penanganan limbah padat B3 (bahan beracun berbahaya) menyusul dihentikannya penanganannya oleh perusahaan PPLI sejak 1998 karena dugaan adanya praktek KKN. Waktu itu, Pertamina sedang menunggu pihak lain di luar PPLI yang mampu memusnahkan limbah yang masuk dalam kategori berbahaya tersebut.

Dalam sebuah kesempatan, General Manager Pertamina UP VI Balongan Edi Setianto mengungkapkan, tanpa mempengaruhi hasil atau upaya yang tengah dilakukan Pertamina dan pihak aparat hukum atas dugaan adanya praktek KKN dalam penunjukkan PT PPLI, sejauh ini yang memiliki kemampuan mengolah atau memusnahkan limbah B3 sesuai standar yang ditentukan KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) adalah PPLI.

"Bukan hanya Pertamina yang menggunakan jasa PPLI untuk pemusnahan limbah B3, tapi perusahaan besar Indonesia lainnya, bahkan perusahaan asing yang menghasilkan limbah B3 pada kegiatan produksinya, banyak menggunakan jasa PPLI. Oleh karena itu, untuk menghindari penumpukan, Pertamina tengah menjajaki kembali menarik PPLI meski dikerjasamakan dengan pihak ketiga," kata Edi Setianto.

Ia menjelaskan, hingga saat ini setidaknya sudah sekitar 16 ribu ton limbah jenis B3 yang menumpuk di lahan khusus UP VI. Edi mengkhawatirkan, jika ini tidak ditangani secara cepat, jumlah tumpukan akan semakin banyak dan mengganggu.

Sesungguhnya, kata Edi, PPLI tidak semata-mata dimiliki oleh kelompok usaha Bimantara, tetapi saham kepemilikan juga ada nama pemerintah c.q. Kementerian

Lingkungan Hidup di situ, di samping nama-nama pemilik saham lainnya di luar lingkaran Cendana. "Harus diakui, sampai saat ini baru PT PPLI yang memiliki kompetensi mengolah limbah B3 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kementerian LH. Kalau mau jujur, memang penanganan B3 agak rumit terutama dalam hal prosedurnya yang memerlukan proses waktu yang agak panjang. Tempo hari ada yang menggunakan jasa sebuah perusahaan pemusnah limbah, namun belakangan diketahui, perusahaan tersebut belum mendapat izin dari KLH," tuturnya.

Menurut Edi, ia amat menghindari penggunaan perusahaan jasa pemusnah limbah yang belum jelas statusnya. Sebab bagaimanapun, sesuai UU atau peraturan yang berlaku, jika terjadi sesuatu atas penanganan limbah itu, misalnya jatuh tercecer di jalan dan sebagainya, maka yang bertanggung jawab bukan perusahaan tersebut, tetapi tetap perusahaan yang menghasilkan limbah, dalam hal ini, Pertamina jika Pertamina yang mengorder.

Mengingat persoalan limbah ini harus dicari jalan keluarnya, menurut Edi pihaknya kini tengah menunggu hasil peninjauan kerja sama PPLI serta pabrik Semen Gresik dan Cibinong. "Untuk menepis isu KKN, kita akan transparan serta akan membuat kontrak yang tidak mengikat sehingga tidak bisa dikatakan KKN. Kita lakukan se-fair mungkin," katanya.

Neraca mencatat, sebelumnya Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) mengancam melakukan pemblokiran kegiatan usaha Pertamina di Balongan, Indramayu apabila tuntutan pembersihan limbah sisa olahan minyak mentah tidak terpenuhi. "Kami minta pertanggungjawaban serius Pertamina," kata Nono Sudarsono, salah satu perwakilan KOMPI sesuai melakukan pertemuan dengan pihak PT (Persero) Pertamina di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia juga menjelaskan, selain soal *sludge*, KOMPI menuntut agar Pertamina menuntaskan permasalahan pipa-pipa miliknya yang mengalami kebocoran sehingga mencemari perairan di wilayah tersebut. "Untuk itu, kami meminta kepada Pertamina untuk secepatnya menangani permasalahan itu sampai tuntas. Kalau masih tidak diindahkan, maka mulai 26 April 2004, kami akan memblokir kegiatan Pertamina di Balongan," katanya mengancam. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 2	
TAHUN 2004	

Dirugikan Tumpahan Minyak, Warga Balikpapan Bisa Ajukan Gugatan

Samarinda, Kompas - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Budi Utomo menyatakan, warga harus melakukan gugatan *class action* jika dirugikan dalam kasus pencemaran pantai di Balikpapan akibat tumpahnya minyak mentah. Dia juga menyatakan, penyelidikan intensif terus dilakukan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam pencemaran tersebut.

Hal ini dikemukakan Budi Utomo usai menghadiri acara "Gerakan Moral Memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba" di Samarinda, Sabtu (26/6). "Kami masih menyelidiki siapa yang bertanggung jawab, masyarakat juga harus bisa melakukan gugatan hukum atau *class action* dalam kasus itu," katanya.

Seperti diberitakan, sebagian pesisir pantai di Balikpapan tercemar limbah minyak mentah yang berbentuk gumpalan hitam mirip aspal. Gumpalan tersebut tidak tercampur dengan air maupun pasir pantai dan terapung-apung di air. Gumpalan berwarna hitam yang mengapung di air tersebut juga menyebabkan sejumlah bi-

ota laut di pantai mati akibat terkena pencemaran itu.

Sampai Sabtu siang, gumpalan minyak mentah yang berwarna hitam masih mengotori pantai Balikpapan. Gumpalan minyak itu terlihat berasal dari tengah laut kemudian terbawa ombak dan embusan angin hingga ke tepi pantai.

Asisten Humas Pertamina Unit Pemasaran V Balikpapan Chusnul Busro mengatakan, untuk mengetahui asal minyak mentah tersebut sedang dilakukan penelitian laboratorium di Handil. Dari jenis tumpahan minyak mentah tersebut kelak

akan bisa diketahui apakah limbah tersebut berasal dari sumbu pengeboran lepas pantai atautkah dari kapal tanker.

Belum ada tersangka

Mengenai kemungkinan adanya penetapan tersangka, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. "Saat ini sedang diteliti, masih kita lihat," ujarnya.

Budi Utomo mengakui, untuk menjerat pelaku yang bertanggung jawab atas tumpahnya minyak yang mengotori pantai di

Balikpapan tersebut dengan Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup masih sangat sulit. Menurut dia, masalahnya adalah pada lemahnya UU tersebut. Selain itu, tambahnya, belum ada yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan itu.

Kepala Polda juga menegaskan, pihak yang bertanggung jawab dalam pencemaran itu harus segera membersihkan wilayah pantai Balikpapan. "Siapa pun yang melakukannya harus bertanggung jawab untuk membersihkannya," ujarnya.

(RAY/THY)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2004

BP to sign \$1.43b LNG deal with Posco

Bloomberg
Seoul

BP Plc., Europe's largest oil company, will sign a US\$1.43 billion contract on Wednesday to supply 11 million metric tons of liquefied natural gas to Posco, South Korea's largest steelmaker, over 20 years starting in 2005.

BP and its partners in Indonesia's \$2.2 billion Tangguh project will sign a final sales agreement with Posco officials on the Indonesian island of Bali. Kim Soo Jung, a spokeswoman for the steelmaker, said in a telephone interview in Seoul.

In August last year, BP and BP Migas, Indonesia's oil and gas regulator, signed a preliminary agreement to supply 550,000 tons a year of the fuel to Posco. They also signed a preliminary contract to supply 600,000 tons a year to SK Corp., South Korea's largest oil refiner, over 20 years from 2006. SK has the right to buy an extra 200,000 tons of LNG each year until 2010.

LNG imports by Posco and SK Corp. for their own use will end state-run Korea Gas Corp.'s monopoly on supplies of the fuel in Korea. The government is pushing ahead with a plan to reorganize the gas industry to allow other compa-

nies to import and sell the fuel in the domestic market.

Indonesia, the world's biggest LNG exporter, agreed to sell the fuel to Posco and SK Corp. at a higher price than to China, Djoko Harsono, head of marketing at BP Migas, said last month in Jakarta.

"I can't say we are paying less than China does," said Park Sung Eun, an official at Posco's LNG project team. He declined to elaborate.

Indonesia had agreed to sell 2.6 million tons a year of LNG to China's Fujian province for about \$2.40 per million British thermal units based on a formula linked to oil prices, said Rachmat Sudibyo, head of the regulatory agency, in October 2002.

He put the worth of the contract with Posco at \$1.43 billion last year.

Indonesia wants PT Badak NGL in Bontang, the world's biggest LNG plant, to supply Korean buyers the fuel initially because gas won't start flowing from Tangguh until 2007.

Posco is spending \$290 million to build a terminal in Korea able to return about 1.7 million tons a year of LNG to gas form. Posco plans to share the terminal that's scheduled for completion in March 2005 with SK Corp., which will buy the fuel through its unit SK Power Co.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td> <td style="width: 10%;">FEB</td> <td style="width: 10%;">MAR</td> <td style="width: 10%;">APR</td> <td style="width: 10%;">MEI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>JUN</u></td> <td style="width: 10%;">JUL</td> <td style="width: 10%;">AGST</td> <td style="width: 10%;">SEPT</td> <td style="width: 10%;">OKT</td> <td style="width: 10%;">NOV</td> <td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td><u>28</u></td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	<u>JUN</u>	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	<u>28</u>	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	<u>JUN</u>	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	<u>28</u>	29	30	31														
HALAMAN : 15																																												
TAHUN 2004																																												

Sumber Energi Bergantung Minyak

BLORA, KOMPAS — Sebagian besar kebutuhan energi dalam kehidupan manusia modern saat ini sangat tergantung pada minyak mentah dan energi fosil lainnya, seperti gas bumi dan batubara yang bersifat tak terbarukan (*non renewable*).

Padahal, masa depan sektor energi dibayang-bayangi oleh kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional. Selain itu, konsumsi energi fosil komersial terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah populasi warga dunia dan kegiatan perekonomian yang terus tumbuh.

Demikian orasi ilmiah Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bertajuk "Mengagas Masa Depan Sektor Energi dalam Paradigma Pemba-

ngunan Berkelanjutan" pada acara wisuda Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) angkatan II tahun akademik 2003/2004 di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (26/6).

Menurut Purnomo, kebijaksanaan energi harus mampu menjawab tantangan ketidakpastian tingkat produksi energi untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Mengingat minyak bumi bersifat tak terbarukan.

Produksi sumber energi tersebut akan menurun jika tidak ditunjang oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang memadai. "Sebaliknya, seiring dengan tumbuhnya sektor ekonomi, konsumsi minyak terus berkembang pesat. Sebagai akibatnya, kemampuan ekspor minyak akan menurun dan akan

mengurangi baik pendapatan pemerintah maupun kapasitas impor nasional," tutur Purnomo.

Ia menambahkan, ekonomi pada minyak dan gas bumi telah menimbulkan risiko ketidakstabilan sosial, serta ekonomi dari suatu negara. Krisis energi yang terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an telah mengguncangkan perekonomian dunia, baik di negara-negara yang tidak memiliki maupun yang kaya akan sumber daya energi tersebut.

Booming minyak yang terjadi saat ini sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya de-industrialisasi. Di samping itu, kinerja ekonomi makro negara-negara kaya sumber energi cenderung jauh dari memuaskan. (SUP)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 16																																												
TAHUN 2004																																												

Norway oil output expected to return to normal

Doug Mellgren
Associated Press/Oslo

Oil production in Norway was expected to return to normal this weekend after the government ordered an end to a week-old strike by offshore oil workers that had threatened to choke production in the world's third-biggest oil exporter.

The widely expected government intervention came on Friday, a day after oil companies said they would retaliate by locking out all workers who hadn't yet joined the strike, which had already reduced Norway's

output by 15 percent.

Citing concerns that the escalating dispute could cripple an industry that produces 3 million barrels of oil a day, the Norwegian government invoked a law compelling both sides to stop industrial action and accept state arbitration.

"Such an escalation of the labor conflict would stop nearly all production and have a large economic impact on society," said Minister of Labor and Social Affairs Dagfinn Hoeybraaten.

Though Norway is third only to Saudi Arabia and Russia as an oil exporter, the strike and threatened lockout had a relatively small impact

on oil prices, partly because binding arbitration was expected.

Fears of a supply squeeze abated earlier this week when Iraq resumed oil exports after sabotaged oil pipelines were repaired.

Norwegian oil workers promised to respect the order to return to work even as a union spokesman claimed the government had been manipulated by the oil companies.

In a statement, the producers' association — which includes ExxonMobil, Royal Dutch-Shell and state-controlled Statoil — welcomed the decision by authorities to step in.

The dispute began last

week after two unions, the Federation of Norwegian Oil Workers and its smaller ally, Lederene, ordered a strike by 207 workers over pensions and job security.

The unions were gradually scaling up the protest, to about 225 workers on Wednesday. About 325 workers had been set to take part in all by Monday, which would have cut Norway's production capacity by a fourth.

On Thursday, the Norwegian Oil Industry Association responded by calling a lockout of as many as 2,500 other workers for next week, which would have stopped virtually all of Norway's oil production.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 8 - 8	
TAHUN 2004	

Transaksi kontrak berjangka BBM di Cina mulai Agustus

SINGAPURA (Reuters): Cina telah mensahkan spesifikasi kontrak berjangka bahan bakar dan berencana memulai perdagangan di Shanghai Futures Exchange Agustus, setelah masa penantian 10 tahun, ujar pejabat bursa, Kamis.

Cina, yang mengimpor sepertiga dari konsumsi harian yang mencapai enam juta barel minyak, membutuhkan alat pengendali risiko dengan denominasi mata uang Cina untuk menghadapi fluktuasi harga.

Cina adalah pembeli bahan bakar terbesar Asia.

Di samping itu, kontrak berjangka itu juga dibutuhkan untuk mengantisipasi meningkatnya persaingan menyusul pembukaan sektor minyaknya secara bertahap bagi pemain asing.

"Permulaannya sekitar Agustus. Rinciannya kontrak sudah semuanya diselesaikan dan disetujui Beijing," kata pejabat besar bursa dari Shanghai.

Lebih dari 180 lisensi pialang kontrak berjangka dan hampir 20 pedagang bahan bakar Cina diperkirakan akan berpartisipasi dengan menjadi anggota bursa, kata pejabat.

Awal tahun ini, Beijing memberikan lampu hijau untuk kembali mentransaksikan kontrak berjangka BBM setelah transaksi produk sejenis untuk bensin dihentikan awal 1990-an, menyusul rawannya spekulasi dan ketatnya kendali pemerintah atas harga minyak.

Pejabat minyak Cina telah mengatakan perdagangan berjangka atas bahan bakar, yang sejauh ini merupakan produk mengalami liberalisasi, dapat membuka jalan untuk memperkenalkan kontrak-kontrak lainnya seperti diesel, bensin dan minyak mentah.

Pedagang minyak BUMN Cina seperti Unipet, Chinaoil, Sinochem dan Zhuhai Zhenrong Corp, Cina mempunyai lebih dari 20 pedagang minyak aktif lokal. (roy)

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : T-4 TAHUN 2004	

Kontrak dengan Posco diteken Rabu

Kogas siap beli 5,3 juta ton/tahun

TOKYO (Bloomberg): BP Plc akan menandatangani kontrak jual-beli LNG senilai US\$1,43 miliar sebanyak 11 juta ton, Rabu, dengan Posco, Korsel, untuk jangka waktu 25 tahun mulai 2005. Sementara Korea Gas Corp (Kogas) berencana meningkatkan pembelian LNG untuk kontrak baru.

"Penandatanganan perjanjian penjualan LNG antara perwakilan Posco di Indonesia bersama BP dan mitranya di Proyek LNG Tangguh senilai US\$2,2 miliar akan dilakukan di Bali," kata jurubicara SK Posco, produsen baja Korsel, Kim Soo Jung, kemarin.

Pada Agustus 2003, BP dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (BP) Migas menandatangani kesepakatan awal untuk memasok 550.000 ton LNG per tahun ke Posco. Mereka juga menandatangani kontrak pasokan 600.000 ton per tahun ke SK Corp, perusahaan pengolahan minyak Korsel selama 20 tahun mulai 2006.

Kepala Pemasaran BP Migas, Djo-ko Harsono bulan lalu menuturkan Indonesia setuju menjual LNG ke Posco dan SK Corp dengan harga

Tahun	Jepang	Korsel	Taiwan
2000	933.660	320.766	145.398
2001	870.978	212.323	155.484
2002	714.426	200.884	120.232

Sumber: Ditjen Migas

yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dijual ke Cina.

Pada Oktober 2002, Kepala BP Migas, Rachmat Sudibyo menjelaskan Indonesia sepakat menjual LNG ke Provinsi Fujian, Cina dengan harga US\$2,4 juta per million British thermal unit (MMBTU) yang dikaitkan dengan harga minyak.

Rachmat tahun lalu menurunkan nilai kontrak penjualan LNG ke Posco adalah US\$1,43 miliar.

Indonesia sendiri menginginkan PT Badak NGL di Bontang, Kaltim memasok kebutuhan LNG kepada pembeli di Korsel karena Kilang LNG Tangguh belum bisa berproduksi hingga 2007.

Korea Gas

Sementara itu, Korea Gas Corp kemungkinan akan meningkatkan pembelian gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) dari 2,3 juta ton menjadi 5,3 juta ton untuk kontrak baru, menyusul berakhirnya kontrak jangka panjang 20 tahun terhitung 2007.

"Korea Gas berencana membeli 5,3 juta ton atau sekitar US\$827 juta [dengan harga US\$3/MMBTU] bahan bakar itu setiap tahunnya mulai 2008, lebih dari dua kali lipat dari pembelian 2,3 juta ton per tahun dari kontrak selama ini," kata Oh Seung Hwan, Manajer pada Tim Pembelian LNG Korea Gas, akhir pekan lalu.

Produsen gas seperti Australia dan Indonesia mengurangi harga jual untuk mendapatkan konsumen, menyusul dikembangkannya lapangan gas yang baru. Sementara pemakaian bahan bakar untuk pembangkit listrik yang ada di AS dan Taiwan

kini dialihkan ke gas alam setelah harga minyak meningkat tajam.

"Sangat baik bagi Korea Gas menambah volume [LNG] melalui kontrak jangka panjang, di mana AS juga meningkatkan pembelian LNG-nya," kata Jay Ryu, analis pada Mirae Asset Securities di Seoul, Korea Selatan.

"Cina juga telah menjadi pembeli [LNG] baru yang sangat besar di Asia. Sekali mereka [AS dan Cina] menjadi pembeli yang serius, pasar akan kembali menjadi pasar penjual."

Chief Executive Korea Gas, Oh Kang Hyun, menuturkan hingga akhir

tahun ini perusahaan itu akan mencari pengganti LNG yang dimpornya dari kilang PT Arun NGL, Indonesia yang gasnya dioperasikan dari lapangan milik Exxon Mobil Corp.

Korea Gas, katanya, meminta pemotongan harga hingga 40% dan persyaratan pasokan yang lebih fleksibel untuk kontrak yang baru dengan Indonesia itu.

Korea Gas memperkirakan permintaan LNG di Korsel akan meningkat menjadi 23,2 juta ton per tahun mulai 2007 dari perkiraan 21,1 juta ton.

"Kami perkirakan kekurangan [pasokan LNG] sedikitnya tiga juta ton mulai 2008. Kami mungkin akan memulai proses seleksi satu atau dua pemasok potensial untuk perundingan yang lebih serius awal bulan depan," tutur Oh.

Korea Gas dan pembeli LNG lainnya saat ini tengah mencari harga yang lebih murah setelah proyek LNG milik Royal Dutch/Shell Group's senilai US\$10 miliar di Sakhalin, Rusia menambah persaingan di jajaran produsen LNG baru.

Korea Gas meminta harga LNG untuk kontrak yang baru sebesar US\$3 per MMBTU, sehingga untuk rencana pembelian 5,3 juta ton LNG dari Indonesia mulai 2008 itu nilainya ditaksir US\$827 juta, (zuf)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN: 20	TAHUN 2004

Solar Langka di Jambi

JAMBI, KOMPAS — Persediaan minyak solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Provinsi Jambi hari Minggu (27/6) kosong, termasuk SPBU yang berada di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera. Sejumlah sopir tetap memarkir kendaraannya di jalur antrean persis di depan SPBU, menunggu pasokan solar dari Pertamina Depot Jambi tiba.

Sejumlah sopir terpaksa membeli solar pada penjual minyak kaki lima dengan harga Rp 2.000 per liter atau Rp 350 lebih mahal dibanding harga di SPBU yang hanya Rp 1.650. Sejumlah pengemudi kendaraan jarak jauh memilih menunggu

di lapangan parkir SPBU, seperti tampak di SPBU Bukit Baling dan SPBU Sengeti.

Namun, separuh dari sekitar 250 pedagang minyak kaki lima di Jalintim di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi tidak memiliki persediaan solar. "Sudah dua hari saya tidak memiliki persediaan minyak solar karena di SPBU juga tidak ada," kata Ny Nur, seorang pedagang di Aur Duri, Kota Jambi.

Pemantauan yang dilakukan Kompas, Minggu kemarin, menunjukkan, minyak solar sudah tidak tersedia di sedikitnya lima SPBU, yaitu SPBU Aur Duri (Kota Jambi), SPBU Sengeti, dan SPBU Bukit Baling (Kabupaten Muaro Jambi), ketiga-

nya di Jalintim. Solar juga tidak ada di SPBU Simpang Lagan (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) dan SPBU Pal V di Jalan Pangeran Hidayat (Kota Jambi). Sekitar 10 SPBU lainnya di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Batanghari tidak sempat dipantau.

Sementara itu, SPBU Simpang Rimbo yang memiliki tiga pompa hanya satu pompa yang aktif melayani pembeli. Akibatnya, antrean kendaraan untuk membeli solar cukup panjang. Di SPBU Sipin juga hanya satu pompa yang beroperasi dari dua pompa yang ada. "Solar belum datang dari Pertamina," kata seorang petugas SPBU Bukit Baling. (NAT)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 9 TAHUN 2004											

Bensin Langka di Gorontalo

Gorontalo, NERACA

Sejak beberapa hari terakhir ini di Provinsi Gorontalo kembali mengalami kelangkaan bahan bakar bensin, sehingga membuat aktivitas kendaraan bermotor di daerah tersebut terganggu.

Menurut pemantauan, Jumat (25/6), antrian panjang berbagai jenis kendaraan bermotor roda dua dan roda empat serta angkutan tradisional roda tiga (Bentor) terjadi semuas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di daerah ini.

"Sekarang ini di SPBU hanya tersedia bahan bakar solar, se-

dangkan bensin sangat sulit ditemukan," kata seorang pengemudi di kendaraan roda empat.

Krisis bensin ini banyak dimanfaatkan oleh para penjual eceran dengan memasang harga Rp 2.500/liter sampai Rp 3.000/liter, jauh di atas harga di SPBU Rp 810/liter. Bahkan, di daerah agak terpencil para pedagang eceran itu menjual bensin dengan harga Rp 5.000/liter.

Petugas di SPBU mengatakan, langkanya bensin akibat kapal tanker yang biasanya membawa bahan bakar ke Gorontalo belum masuk. (Ant/34)

26

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 (28) 29 30 31 HALAMAN: 14 TAHUN 2004											

**Shell braces
for showdown**

LONDON: The management of Royal Dutch/Shell is bracing for a showdown with angry shareholders this week over the oil giant's energy reserves scandal.

The Anglo-Dutch group is facing calls for changes to its governance and ownership structure, under which London-based Shell owns 40 percent of the group and Netherlands-domiciled Royal Dutch Petroleum Company holds 60 percent.

Two heavyweight investors ratcheted up the pressure on Shell ahead of the gatherings, calling for two representatives proposed by investors to be included on a committee reviewing the group's governance and structure. — AFP

27

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

Semua Harus Kompak

Political will saja ternyata tak cukup untuk mewujudkan kendaraan bahan bakar gas. Menurut Ahmad Safrudin, pengurus LSM Mitra Emisi Bersih, ada lima aspek yang harus dilibatkan dalam mewujudkan Program Langit Biru. Aspek yang harus diperhatikan adalah ketersediaan bahan bakar, teknologi kendaraan, penegakan hukum, standar emisi, dan manajemen transportasi. Selama ini program langit bersih larinya hanya pada standar emisi.

Menurut Ahmad, teknologi BBG yang dipakai Pertamina sudah usang. Akibatnya, pengisian BBG lama sekali sehingga pengguna mengeluh. Selain itu, Pertamina bisa mengakali masalah pipa dengan menyediakan tangki bergerak.

Di tingkat yang lebih teknis, kata Ahmad, Lemigas juga perlu dilibatkan untuk pengujian kualitas tabung. Depnaker perlu untuk sosialisasi uji keselamatan kerja pengemudi mobil. DLLAJ melakukan uji KIR kendaraan BBG.

Targetnya pada 2005 Jakarta sebagai pilot project kendaraan BBG. Rencananya akan ada 10 ribu taksi BBG, 2.000 mikrolet BBG, dan 500 bus BBG. "Untuk kendaraan pribadi sifatnya masih sukarela," kata Ahmad. Kendaraan umum yang dirioritaskan karena berhubungan dengan izin trayek.

Kepala BPLHD DKI Jakarta, Kosasih Wirahadikusuma, menyatakan bahwa

Pemprov DKI sangat berkomitmen dengan realisasi BBG. Namun, semua ini bergantung pada regulasi. "Karena itu, kita berharap supaya DPRD segera mengesahkan raperda tentang pengendalian pencemaran udara," ujarnya. "Kami harap begitu Dewan ketok palu, SK Gubernur sudah siap diberiakukan," ujarnya.

Dengan payung hukum berupa perda, kata Kosasih, semua SK Gubernur tentang masalah transportasi dan bahan bakar bersifat mengikat. Ini diharapkan mampu menciptakan permintaan terhadap BBG.

Menanggapi Pertamina yang menetapkan status quo, Kosasih menyatakan kecewa. Meski demikian, ia mengaku memahami alasan Pertamina. Soal harga jual BBG, dia percaya Pertamina tidak mungkin mengingkari janji. "Di antara kami sudah ada kesepakatan bahwa harga jual BBG adalah 60 persen dari harga jual BBM," ujarnya.

Kosasih menyangkan sikap PGN. "Kita juga bisa memahami kesulitan Pertamina terhadap jalur gas di Ibu Kota," ujarnya. Karena itu, jika PGN tidak memiliki niat membangun jaringan pipanisasi, pihaknya akan meminta swasta untuk melakukannya. "ADB sudah bersedia membiayai. Jadi, kalau PGN nggak mau, kita kasih swasta aja," ujar Kosasih. ■ c02

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 **28** 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

Program BBG, Nafsu Besar Tenaga Kurang

Penerapan bahan bakar gas untuk kendaraan, terutama angkutan umum sudah mulai pada 1987. Tapi, programnya tak berkelanjutan.

Udara Jakarta makin tak menyenangkan. Polutan bertambah banyak. Emisi kendaraan bermotor terus menambah pekat awan Ibu Kota. Bahkan, menurut LSM Mitra Emisi Bersih (MEB), pada tahun 2002 warga Jakarta hanya menikmati udara sehat selama 22 hari. Pada 2003 lebih parah lagi, udara sehat hanya terdapat pada tujuh hari dalam setahun.

Kadar pencemaran NO₂, SO₂, PM₁₀, dan O₃ sudah melampaui baku mutu yang ditetapkan berdasarkan standar kesehatan. Padahal, pada 1996 pemerintah mencanangkan 'Program Langit Biru'.

Polusi udara bisa berkurang seandainya emisi kendaraan menyusut. Salah satu caranya adalah menggunakan bahan bakar gas (BBG).

Sebenarnya pengenalan BBG sudah muncul sejak 1987. Tapi, tidak optimal. Sedikit sekali kendaraan yang menggunakan bahan bakar ini.

Mengganti premium dengan BBG bisa menghemat biaya hingga 61,33 persen, sedangkan peralihan dari solar ke BBG bisa menghemat 57,58 persen. Penggunaan BBG juga bisa mengurangi atau menghilangkan praktik pengoplosan, penimbunan, maupun penyelundupan minyak. Stok gas Indonesia juga lebih banyak ketimbang minyak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga jual gas jauh lebih murah daripada bahan bakar lainnya. Harga premium Rp 1.810 per liter, solar Rp 1.650 per liter, sementara BBG Rp 700 per liter.

BBG dipastikan akan mampu mengurangi tingkat polusi karena lebih ramah lingkungan. Kandungan CO-nya hanya 1,6 persen, HC 80 ppm, atau jauh di bawah batas yang ditetapkan. Batas CO selama ini adalah 4,5 persen dan HC 1.200 ppm. Selain itu BBG, memiliki angka oktan yang jauh lebih tinggi (120) dibanding bahan bakar lainnya. Keuntungan lain adalah penggunaan minyak pelumas, busi, dan umur mesin bisa lebih panjang dibanding menggunakan bahan bakar biasa.

Tapi, harapan udara Jakarta lebih bersih masih sebatas mimpi. Cadangan gas memang lebih banyak ketimbang minyak. Namun, suplai gas masih sangat minimal. Suplai tak bisa memenuhi permintaan yang begitu tinggi.

Menurut Didik Wuriady dari Pokja Pemasaran Gas Domestik Pertamina, hingga kini pihaknya menunggu kebijakan pemerintah pusat soal program tersebut. Pertamina menunggu pemerintah akan memberikan subsidi penjualan BBG untuk transportasi atau tidak. Ini karena sejak beralih menjadi persero, Pertamina tidak lagi bisa memberikan subsidi gratis bahan bakar. "Perusahaan kami sekarang berorientasi kepada profit," ujarnya.

Selama ini harga gas yang dijual di pasar Rp 700 per liter. Dari harga ini Pertamina menyubsidi Rp 850 per liter karena biaya produksi gas Rp 1.550. Dalam setahun Pertamina terpaksa menombok subsidi gas sebesar Rp 25 miliar. "Kalau tidak disubsidi, maaf saja!" ujar Didik.

Didik menuturkan, Pertamina bukan lagi lembaga amal yang bisa bebas memberi subsidi bahan bakar. Selama kebijakan pemerintah mengenai subsidi belum turun, Pertamina akan menerapkan status quo untuk BBG.

Selain menunggu kebijakan pemerintah, menurut Didik, pihaknya juga berharap dukungan dari stakeholder lain, misalnya pengelola taksi, Pertamina juga berharap ada *political will* dari

pemerintah pusat untuk mendukung realisasi BBG.

Hal yang sama juga dinyatakan Organda. Menurut Ketua DPP Organda, Gogo Manurung, langkah terpenting untuk realisasi BBG adalah komitmen bersama. "Sebagai pembantu pemerintah, kami dari Organda siap membantu mewujudkan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Pada 1990 Gubernur DKI saat itu pernah membuat SK yang menyebutkan 20-30 persen armada taksi harus menggunakan bahan bakar gas. Namun, kenyataannya taksi pengguna BBG semakin berkurang. Mereka beralih dengan alasan klasik. "Mereka kesulitan mendapatkan BBG," kata Didik.

Didik menyatakan, untuk satu SPBG Pertamina mengeluarkan investasi Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar. Dulu Pertamina berpikir muluk untuk membangun jaringan SPBG di jalur pantura. "Tapi, realisasinya seperti ini," katanya.

Pada, Pertamina sudah mengeluarkan biaya besar untuk listrik, upah, dan perawatan SPBG. Dengan armada BBG yang ada sekarang, pendapatan BBG yang ada sekarang, pendapatan jauh lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk listrik saja Pertamina mengeluarkan abonemen sebesar Rp 15 juta. "Kondisi ini semakin memperberat Pertamina untuk membantu realisasi Program Langit Biru," ujar Didik. Ini terjadi akibat pemerintah tidak tegas menindak pelanggar.

Organda mengakui berkurangnya jumlah kendaraan yang menggunakan BBG. Menurut Gogo, itu terjadi bukan karena faktor Organda, melainkan lebih karena semakin berkurangnya infrastruktur pendukung berupa stasiun pengisian BBG.

Menurut Gogo, penindakan kepada armada yang tidak melakukan realisasi kuota armada sulit dilakukan. Masalahnya tidak ada regulasi yang mengi-

kat dengan kebijakan ini. Selain itu, pihaknya juga tidak bisa memaksa armada taksi beralih ke BBG selama infrastrukturnya belum siap. "Akibatnya, kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk meminta mereka menggunakan BBG," ujarnya.

Awal penggunaan BBG adalah taksi yang menggunakan bahan bakar elpiji. Pada 1996-1997 terdapat 12 SPBB yang menjual elpiji. Namun, jumlah SPBE semakin berkurang. Padahal, kata Gogo, pada awal peluncuran rata-rata yang menggunakan BBG elpiji adalah taksi. Dengan tingkat mobilitas yang tinggi sangat sulit bagi taksi dengan bahan bakar jenis ini mencari pom bensin yang menyediakan elpiji. Akibatnya, jumlahnya terus berkurang.

Didik membantah pernyataan Gogo. Menurutnya, taksi yang menggunakan bahan bakar elpiji hanya Citra dengan kendaraan proton. Lainnya menggunakan CNG (*compressed natural gas*). CNG bisa didapat di berbagai stasiun pengisian bahan bakar.

Pertamina kesulitan membangun SPBG di jalur utama kota karena tidak tersedia jaringan pipa. Sangat sulit membangun tangki BBG dengan sistem tidak ditanam. "Biaya yang harus dikeluarkan akan semakin besar," ujar Didik.

Untuk segera merealisasi penggunaan BBG, kata Gogo, dibentuklah tim nasional dan tim DKI untuk meminta pemerintah menetapkan regulasi penggunaan BBG. "Mudah-mudahan

instruksi presiden bisa keluar Juli ini," kata Gogo. Begitu juga dengan SK Gubernur DKI yang mengatur pelaksanaan realisasi BBG di DKI.

Untuk merangsang penggunaan BBG, Pertamina berharap pemerintah mau memberi keringanan. Bisa berupa subsidi ataupun insentif bagi kendaraan yang mau menggunakan BBG. Keringanan itu bisa berupa pinjaman untuk pembelian *converter kit*, bebas

fiskal bagi impor kendaraan dengan teknologi BBG, dan keringanan pajak STNK.

Ahmad Safrudin, pengurus LSM Mitra Emisi Bersih, menyatakan bahwa realisasi BBG bukan sekadar urusan Departemen Perhubungan, Pertamina, dan BPLHD. Mengandalkan kebijakan pemerintah di tingkat DKI saja akan sangat sulit karena tidak ada payung hukum yang mengikat. ■ co2

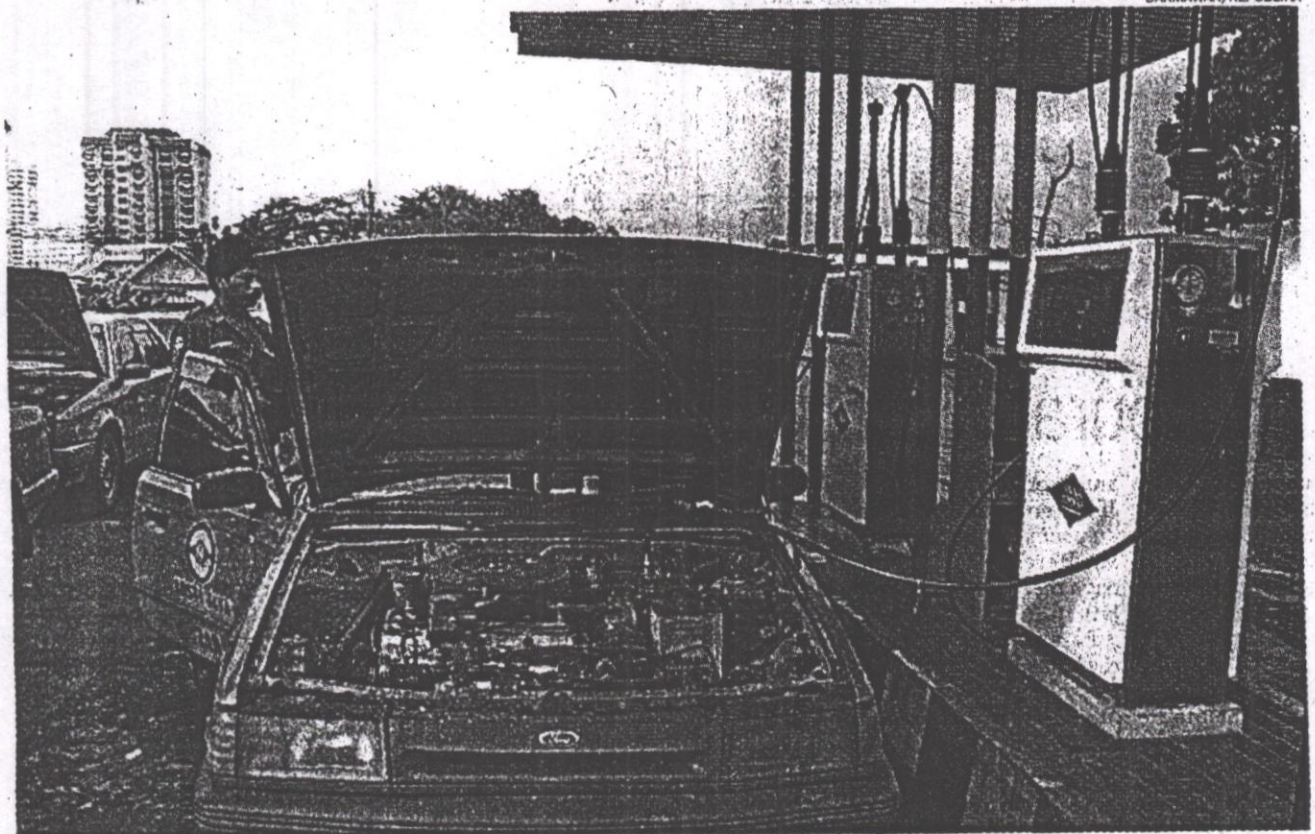
16 Lokasi SPBG di Jadebotabek

1. Jl. Sumenep, Jakarta Pusat
2. Jl. Pemuda, Jakarta Timur
3. Jl. Raya Bekasi, Bekasi
4. Jl. Raya Bogor, Bogor
5. Jl. Ahmad Yani, Jakarta Timur
6. Jl. Ciliw, Jakarta Utara
7. Boulevard Timur, Jakarta Utara
8. Jl. Damai Sunter, Jakarta Utara
9. Jl. Kalderes, Jakarta Barat
10. Jl. Daan Mogot (Pool PPD), Jakarta Barat
11. Wanung Bunchi, Jakarta Selatan
12. Jl. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
13. Jl. Tebet Timur, Jakarta Selatan
14. Jl. Raya Pondok Indah, Depok
15. Jl. Margonda, Depok
16. Jl. Land Sudirman, Tangerang

Jumlah BBG

Tahun	Jumlah BBG	
	Kendaraan BBG	Bus BBG
1995	3.000	—
1996	3.889	—
1997	4.503	40
1998	4.881	40
1999	4.944	40
2000	6.633	25
2001	4.660	18
2002	2.500	5
2003	1.500	5

Sumber: Pertamina



ANTRE BBG: Sejumlah taksi sedang antre mengisi bahan bakar gas (BBG) di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jakarta.